



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA ALAM PERAIRAN
KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 - 2034.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan panduan operasional pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya di Provinsi Papua Barat.
- KETIGA : Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2014

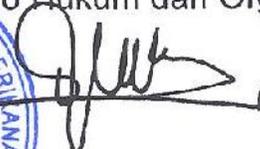
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO
SEBELAH BARAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2014 – 2034

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Raja Ampat dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas sumber daya pesisir dan laut yang tinggi. Indikasi ini telah diperkirakan sejak lama dengan adanya beberapa kegiatan penelitian di Raja Ampat seperti datangnya kapal Perancis L'Uranie (1818-19), La Coquille (1823), L'Astrolabe (1826), dan peneliti Peter Bleeker (1860-an), Alfred Wallace (1860-1861) dan Snellius (1920). Sejak tahun 2000, Conservation International (CI) dan The Nature Conservancy (TNC) melakukan serangkaian penelitian di Raja Ampat terutama untuk mengetahui status keanekaragaman hayati laut di kepulauan ini. Melalui serangkaian survei ini kemudian para ahli kelautan menyatakan bahwa wilayah Kepulauan Raja Ampat memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi dunia. Kepulauan ini memiliki setidaknya 1.318 jenis ikan karang (Allen dan Erdmann, 2009) dan 533 jenis karang keras (Turak dan Devantier, 2008).

Dalam konteks regional, Kepulauan Raja Ampat termasuk dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*) dan merupakan bagian kawasan penting keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Kawasan segitiga karang ditandai dengan adanya 500 atau lebih jenis karang dan merupakan pusat dari kelimpahan dan keragaman karang di bumi. Kawasan segitiga karang ini meliputi 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Sumber daya hayati pesisir dan laut yang tinggi dan luar biasa di kawasan segitiga karang dapat menjadi sumber protein, pendapatan dan penghidupan bagi lebih 120 juta masyarakat didalamnya yang tergantung dari kegiatan perikanan. Selain itu, kawasan ini juga bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wisata,

serta dapat melindungi masyarakat pesisir dari bahaya badai dan tsunami.

Potensi karang dan ikan karang yang tinggi dengan kondisi yang secara umum masih baik, serta pemandangan pantai dan pulau-pulau yang indah, menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tujuan wisata laut seperti kegiatan menyelam dan *snorkeling* yang banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Data dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat. Selain itu pendapatan dari *conservation fee* melalui tiket masuk dan jumlah *resort* yang ada juga menunjukkan peningkatan. Berbagai informasi tentang Raja Ampat telah dipublikasikan baik skala nasional maupun internasional.

Untuk menjamin kelestarian sumber daya dan manfaatnya dalam jangka panjang, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan upaya-upaya pengelolaan melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Raja Ampat. Sampai saat ini, di Kepulauan Raja Ampat terdapat 2 (dua) buah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, dan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut sekitarnya dengan luas masing-masing 60.000 ha dan 271.630 ha.

Status SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat relatif masih baru, karena pengelolaannya diserahkan oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Maret 2009 sebagai bagian dari penyerahan 8 (delapan) kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dikelola Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Serah terima pengelolaan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2009 dengan Berita Acara Nomor : BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor : BA.108/MEN.KP /III/2009.

Menindak lanjuti penyerahan SAP tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor : KEP. 65/MEN/2009 tentang Penetapan KKPN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut sekitarnya. Dalam Kepmen KP tersebut dinyatakan bahwa KKPN ini ditetapkan sebagai Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Sebagai konsekuensi penunjukan status kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, maka perlu disusun dokumen rencana pengelolaan. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan didasarkan pada fungsi ekologis, pola pemanfaatan, dan kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, pola pengelolaan kawasan harus bersifat jelas, komprehensif, sistematis dan mengakomodasi setiap kemungkinan pengembangannya. Rencana pengelolaan disusun agar pemantauan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat tetap mempertahankan fungsi sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi ini merupakan penjabaran dari arahan umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Proses penyusunan dokumen ini telah melibatkan para pihak baik di tingkat propinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mewadahi kepentingan pemerintah dan masyarakat diseluruh tingkatan.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis geografis serta pemetaan (mapping) yang dilakukan di lapangan, ditemukan perbedaan yang termuat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 yaitu antara titik kordinat dengan gambar dan luas kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Berkenaan dengan hal tersebut maka titik koordinat kawasan mengalami perubahan sehingga sesuai dengan luas kawasan dan gambar dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tersebut.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RPZ SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah sebagai acuan dan panduan dalam:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. perlindungan dan pelestarian kawasan;
3. pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya; dan
4. mengevaluasi efektifitas pengelolaan kawasan.

C. Ruang Lingkup

1. Lingkup Wilayah

Lingkup Wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yaitu wilayah perairan seluas 125.000 ha terletak dibagian barat Kabupaten Raja Ampat, berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara dibagian barat dan berbatasan dengan Republik Federal Palau di sebelah utara.

2. Lingkup Materi

Dokumen RPZ SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat ini terdiri dari :

- a. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan;
- b. Penataan Zonasi;
- c. Arahan rencana pengelolaan kawasan.

3. Lingkup Jangka Waktu

Lingkup waktu RPZ SAP ini terdiri dari:

- a. Rencana Jangka Panjang selama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Jangka Menengah selama 5 (lima) tahun.

BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN

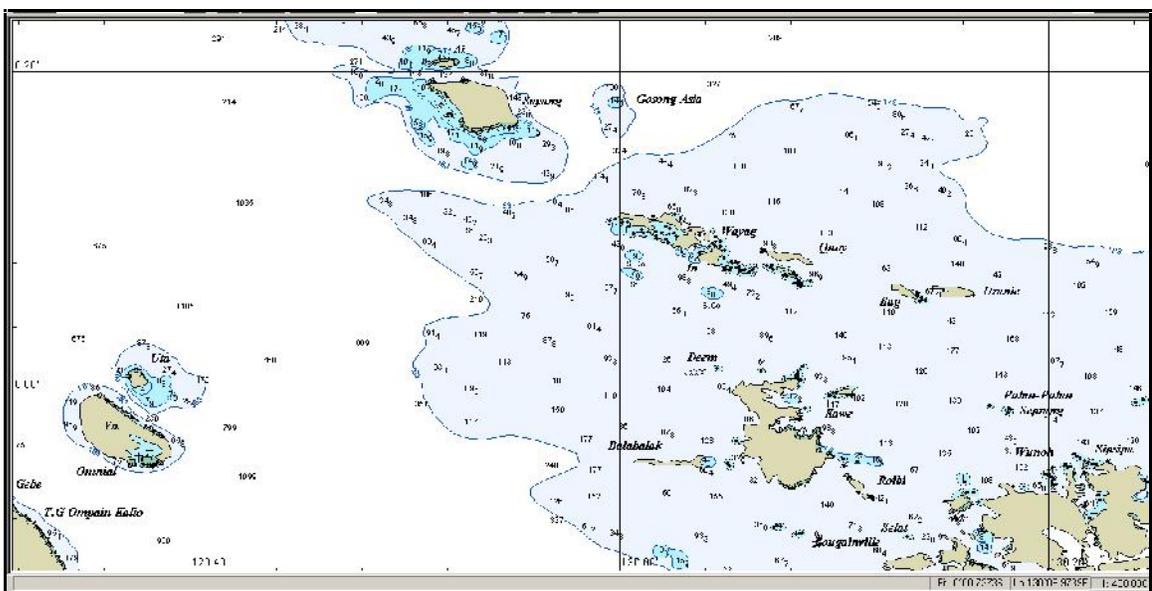
A. Potensi

Potensi yang terdapat di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat meliputi potensi ekologi, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya. Ketiga potensi ini merupakan modal dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga potensi tersebut.

1. Potensi Ekologis

a. Ekosistem Pesisir dan Laut

SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil dan pulau-pulau karst sebanyak 100 pulau yang tidak berpenghuni, kecuali Pulau Piai dan Pulau Sayang dibagian timur SAP ini. Pada umumnya, daerah sepanjang pantai utara pulau-pulau di Waigeo mulai dari Pulau Uranie hingga Pulau Wayag berupa batuan karst dengan kontur bawah air tegak lurus dan sangat sedikit karang hidup. Sebaliknya pada sisi selatan pulau-pulau tersebut memiliki kontur perairan landai hingga curam dengan banyak pantai pasir putih dan terumbu karang di dasar perairannya. Melihat karakter daerahnya seperti penjelasan di atas, SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat relatif tidak mempunyai ekosistem padang lamun dan hutan mangrove. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Wayag dan Sayang sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Wayag dan Sayang.

Pemandangan alam dari Pulau Uranie hingga sekitar Kepulauan Wayag sangat indah berupa pulau-pulau kecil berbentuk bukit karst diantara laguna. Di kawasan ini juga ditemukan beberapa danau air asin. Untuk penyelaman ditemukan titik-titik penyelaman dengan tipe penyelaman meliputi penyelaman berarus (drift dive), penyelaman goa (cave diving), penyelaman obyek makro di air keruh (muck dive) dan penyelaman wisata pada umumnya dengan memanfaatkan liveboard atau kapal wisata. Kepulauan Wayag merupakan salah satu lokasi favorit bagi para turis yang mengunjungi Raja Ampat.

Tipe terumbu karang di sekitar Kepulauan Wayag adalah terumbu karang tepi (fringing reef) dan sebagian kecil karang gosong (patch reef). Kontur terumbu pada daerah tersebut umumnya curam hingga tegak lurus dengan kecerahan air 10 – 15 m. Kontur terumbu datar hingga landai hanya berada di barat dan utara Pulau Piai dan barat, selatan dan timur Pulau Sayang serta teluk-teluk di dalam Pulau Wayag. Survey mantatow oleh CI pada 2008 diketahui persentase penutupan karang hidup di SAP Kepulauan Waigeo berkisar antara 0 – 70% dengan rata-rata tutupan 20.55%, sedangkan rata-rata persentase penutupan biota lainnya adalah 17.49%. Persentase penutupan rata-rata karang mati adalah 41.03%, sedangkan persentase penutupan pasir dan patahan karang masing-masing adalah 12.17% dan 8.76%.

b. Sebaran Biota Laut

Pulau Piai dan Pulau Sayang merupakan tempat bertelur penyu hijau dan penyu sisik bertelur. Hasil manta tow selama 8 hari ditemukan penyu hijau 38 ekor dan penyu sisik 49 ekor (CI, 2008). Pada umumnya disekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat banyak ditemukan kima raksasa. Selain itu teripang, lola dan lobster serta ketam kenari cukup mudah untuk dijumpai. Perairan sekitar SAP ini merupakan tempat perlintasan cetacean (paus dan lumba-lumba) yang meliputi lumba-lumba risso (*Grampus griseus*), lumba-lumba hidung botol umum (*Tursiops truncatus*) dan lumba-lumba spinner (*Stenella longirostris*).

Perairan sekitar Kepulauan Wayag-Sayang juga merupakan tempat hiu beregenerasi dan memulihkan populasinya. Cukup mudah untuk menemukan anakan hiu berenang disekitar pantai. Selain itu ditemukan banyak tempat berkumpulnya (agregasi) ikan

pari manta di beberapa tempat. Potensi ikan di SAP Kepulauan Waigeo cukup tinggi. Rata-rata biomassa ikan di lokasi-lokasi pengamatan di SAP ini sekitar 53.17 ton/km² (Allen. M, 2008).

SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah daerah penting sekali untuk ruaya Paus, Penyu Hijau, Penyu Sisik, ikan hiu, dan manta. Pulau Sayang-Wayag adalah daerah sangat penting dari sisi bertelur Penyu Hijau. Daerah ini juga menjadi daerah perlindungan penyu sejak lebih dari 2 tahun silam, dan tingkat keberhasilan penetasan telur penyu semakin meningkat. Wayag juga sebagai tempat beranak hiu dan mungkin lain lain. Wayag mempunyai tempat beranak hiu. Fitur pulau-pulau karst wayag sangat eksotis dan mengagumkan. Kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai ukuran marine lake dan situs anchianline lainnya yang menjadi habitat komunitas biota yang saling berasosiasi dan berpotensi endemik. Di antara pulau-pulau di wayag terdapat terusan (channel) yang menghubungkan laut dengan terumbu laguna (lagoonal reef).

2. Potensi Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di kampung-kampung sekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat hampir sama dengan mata pencaharian penduduk di pulau-pulau kecil lainnya yaitu sebagai nelayan. Mata pencaharian sampingan dengan berkebun atau mengumpulkan hasil hutan disekitar kampung.

Potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh nelayan di sekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah batu-batu (kakak tua), bubara (kuwe), cangkalang, gutila (lencam). Jenis alat tangkap yang dipergunakan untuk menangkap ikan antara lain; pancing, pancing dasar, cigi, jaring insang dan speargun.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak pertengahan 1997 mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat No. 63, 64 dan 65 dan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2012 terkait retribusi pariwisata dan pembentukan tim pengelola dana non retribusi. Pembentukan peraturan tersebut didasari dengan semakin banyaknya wisatawan dalam dan luar negeri berkunjung ke Raja Ampat untuk menyelam tanpa memberikan kontribusi bagi pengelolaan sumberdaya laut Raja Ampat, masyarakat setempat dan pembangunan daerah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Raja Ampat dikenakan tarif retribusi sebesar

Rp.600.000 berlaku selama setahun dengan diberikan pin, dan wisatawan dalam negeri sebesar Rp.250.000. Dana retribusi yang diperoleh sebesar 30% dialokasikan sebagai dana retribusi dan 70% sebagai dana non retribusi. Dana non retribusi ini dialokasikan sebesar 40% untuk dana konservasi, 40% untuk program ekonomi kreatif masyarakat dan 20% untuk administrasi pengelolaan.

Melalui promosi, pengelolaan obyek-obyek pariwisata dan wisatawan terlihat bahwa jumlah wisatawan ke Raja Ampat semakin meningkat dari pertengahan tahun 1997 sebanyak 998 orang menjadi 2.645 orang tahun 1998 dan 3.210 orang tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah wisatawan asing sebanyak 932 meningkat menjadi 6073 orang pada tahun 2012. Sedangkan jumlah wisatawan domestic dari 66 pada tahun 2007 meningkat menjadi 1717 orang pada tahun 2012. Secara umum wisatawan asing lebih banyak yang berkunjung ke Raja Ampat.

Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat

Wisatawan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
International tourists	932	2,366	2,872	3,858	5,159	6,037	21224
Local tourists	66	279	338	652	1,246	1,717	4298

Sumber : Dinas Pariwisata Raja Ampat 2013.

Selain itu jumlah resort juga bertambah dari 2 resort tahun 1997 menjadi 6 resort tahun 1999, dan jumlah kapal pariwisata (*liveabords*) yang berkunjung dari 5 regular tahun 2007 menjadi 27 regular tahun 2010 (CI, 2010).

3. Potensi Sosial Budaya

Pulau-pulau yang ada didalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni. Namun demikian wilayah ini merupakan bagian dari hak ulayat atau petuanan suku/etnis Kawe Raja Ampat yang tinggal di 2 kampung jauh diluar SAP ini yaitu Kampung Selpele dan Kampung Salio di Distrik Waigeo Barat di Pulau Waigeo bagian barat. Di kedua kampung ini terdapat beberapa marga dari suku Kawe Raja Ampat yang memiliki petuanan mulai dari Pulau Uranie sampai Pulau Piai.

a. Kependudukan

Secara administratif Kampung Selpele dan Salio berada dalam distrik Waigeo Barat. Luas Kampung Selpele 80 ha dengan dihuni 78 KK, sedangkan Salio 250 ha dengan dihuni 85 KK. Suku/etnis yang tinggal di Kampung Selpele didominasi oleh suku Kawe Raja Ampat 82 % dan di Salio didominasi oleh suku yang sama hampir 90% (Ayello dkk, 2010).

Sebagai wilayah pertuanan, penduduk kampung Sarpele dan Salio memiliki sasi khusus lola, lobster dan teripang di perairan SAP Kepulauan Waigeo. Sasi tersebut terdapat di perairan sekitar Pulau Uranie, Pulau Bag, Pulau Quoy dan Kepulauan Wayag. Sampai saat ini pemanfaatan sasi baru sekali dilaksanakan oleh penduduk dari kedua kampung selama 10 hari pada Oktober 2009. Waktu buka dan tutup sasi serta alat tangkap dan cara penangkapan diatur melalui kesepakatan masyarakat. Hasil yang didapat selama 10 hari buka sasi sebanyak 1.705 ekor lobster dengan berat 845 kg, 1.870 lola dengan berat 615 kg dan 1.020 ekor teripang dengan berat 130 kg (Thebu, 2010).

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*"

B. Permasalahan Pengelolaan

Beberapa permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat diidentifikasi dari hasil-hasil pertemuan dan konsultasi publik dengan stakeholder dilapangan maupun dari hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Kebijakan pembangunan Kabupaten Raja Ampat yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

Sebagai sebuah kabupaten baru dibentuk pada tahun 2004, Kabupaten Raja Ampat memerlukan serangkaian pembangunan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan harus didasari dengan karakteristik Raja Ampat sebagai kabupaten kepulauan dengan potensi utama sumberdaya pesisir dan laut, dan sifat pembangunan yang berkelanjutan.

2. Terumbu karang mati akibat bukaan lahan dan aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan.

Pembukaan hutan dan lahan untuk perkebunan juga mulai banyak dilakukan disekitar kawasan sehingga dikhawatirkan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya sedimentasi diperairan. Selain itu aktivitas dari wisatawan yang tidak ramah lingkungan seperti tambatan kapal dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang karena perairan disekitar kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada umumnya merupakan perairan yang dangkal.

3. Belum ada lembaga pengelola kawasan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilapangan yang secara rutin melakukan pengelolaan.

Sebagai sebuah KKP yang baru diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2009, dari status Suaka Margasatwa Laut dibawah pengelolaan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam) Provinsi Papua Barat menjadi SAP dibawah pengelolaan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) yang terletak di Kupang, dapat dipahami apabila keberadaan lembaga pengelola kedua SAP dilapangan setingkat UPT belum ada. Hal ini dikarenakan birokrasi dalam pembentukan sebuah lembaga baru dalam sistem pemerintahan yang tidak memungkinkan dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian mengingat lokasi BKKPN Kupang yang jauh dan pentingnya kedua SAP untuk segera dikelola secara efektif dan efisien, maka keberadaan lembaga pengelola setingkat UPT di Raja Ampat sangat penting untuk dibentuk guna mewujudkan pengelolaan kedua SAP yang lebih baik.

Sampai saat ini lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola adalah BKKPN Kupang. Selanjutnya, BKKPN menunjuk beberapa stafnya untuk diberi tanggungjawab untuk memulai pengelolaan SAP ini. Sehingga, sampai saat ini belum ada kelembagaan khusus setingkat UPT yang dibentuk untuk mengelola kedua SAP tersebut. Selain itu, berdasarkan FGD dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, mereka menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam mengelola kawasan tersebut. Hal ini juga terkait dengan kerangka kerja jejaring

KKP di Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini sedang mengembangkan pengelolaan beberapa kawasan konservasi perairan yang dicadangkan melalui Peraturan Bupati.

Praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan potasium sianida masih merupakan persoalan yang terjadi dimana-mana. Kerusakan terumbu karang dan habitat lainnya akibat kegiatan ini sangat besar, sedangkan daya pulih ekosistem tersebut tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan survei dan diskusi yang dilakukan bersama masyarakat dan stakeholders terkait, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini masih sering terjadi di Kabupaten Raja Ampat baik dilakukan oleh nelayan setempat ataupun oleh nelayan dari luar daerah. Setelah adanya program pendidikan dan penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum, program ini cukup efektif untuk mengurangi kejadian-kejadian pelanggaran penggunaan bom dan potasium sianida. Namun hingga kini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan terutama oleh nelayan luar daerah.

4. Penangkapan ikan secara berlebihan oleh nelayan luar Kabupaten Raja Ampat

Selain alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, masyarakat setempat juga mengeluhkan beroperasinya alat tangkap modern yang dapat berdampak terhadap penangkapan ikan yang berlebih. Nelayan luar daerah yang menggunakan alat lebih canggih dan dengan kapasitas kapal yang jauh lebih besar mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan nelayan lokal. Nelayan luar diperkirakan mengeksploitasi 70% sumberdaya ikan yang ada di Raja Ampat.

5. Pemahaman terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan di tingkat masyarakat menyebabkan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya pesisir relatif masih rendah. Selain itu kurangnya kapasitas pemerintah juga menyebabkan program peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan relatif lamban

6. Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan SAP maupun pengawasan kawasan

Dua SAP yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat ini relatif masih baru bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak setahun terakhir, belum ada langkah yang signifikan dalam mengelola kedua SAP ini. Penempatan staf BKKPN di Waisai, Ibukota Raja Ampat, dirasa belum efektif karena tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. BKKPN Kupang diharapkan dapat menjadi pengelola atau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan cikal bakal lembaga pengelola kawasan konservasi ini. Namun demikian, saat ini BKKPN Kupang masih dalam tahap pengembangan kelembagaan, sedangkan kawasan konservasi yang diserahkan oleh pemerintah kepada BKKPN Kupang ini relatif banyak. Sehingga dengan daya dukung sumberdaya manusia belum mencukupi dan kurangnya dana yang tersedia, menyebabkan staf yang ada dilapangan belum efektif melakukan tugasnya.

7. Masyarakat kurang merasakan manfaat ekonomi dari adanya aktifitas pariwisata di kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Masyarakat mengeluhkan tentang pengelolaan dana retribusi yang diperoleh pada aktivitas pariwisata di kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang seharusnya digunakan untuk program pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Diharapkan kebijakan pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat melindungi dan melestarikan kawasan konservasi perairan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENATAAN ZONASI

A. Umum

Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dapat dilakukan melalui 3 prinsip pendekatan (DKP, 2007). Ketiga pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya ikan (UNCLOS pasal 61-68). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU 17/1985, yang menekankan perlunya pengelolaan perikanan, karena sumber daya ikan tidak tanpa batas kelestarian. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang paling tua terdiri dari pengaturan dan pengelolaan kegiatan individual di sektor kelautan, seperti perikanan tangkap komersial yang dilakukan oleh satu lembaga pemerintah, dengan berbagai tindakan koordinasi dengan berbagai lembaga lain. Biasanya, tingkatan koordinasi yang terjadi sangat lemah atau bahkan tidak ada dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (Kelleher and Kenchinton, 1991).

KKP yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui keputusan menteri, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembagian zonasi, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola kawasan tersebut. Proses zonasi hendaknya didasarkan pada kajian ilmiah dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah diakui oleh para ahli. Kriteria yang dipakai dalam proses zonasi diantaranya meliputi:

1. Adanya keterwakilan ekosistem dan ulangan habitat yang dikonservasi;
2. Ukuran yang tidak terlalu kecil;
3. Persentasi habitat penting yang dilindungi mencapai sekitar 30%;
4. Pemilihan lokasi yang masih virgin atau dalam kondisi sangat baik;
5. Secara sosial ekonomi, sejauh mungkin zona inti berada jauh dari pusat permukiman penduduk (modifikasi dari Mouse, 2007).

Beberapa tahapan kegiatan dan studi dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan review zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Pengumpulan data dan review zonasi
- b. Analisis data
- c. Penyusunan draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- d. Konsultasi Publik 1

- e. Perbaiki draft Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- f. Konsultasi Publik 2
- g. Finalisasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

1. Proses Penataan Zonasi

Proses penataan zonasi merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses pengembangan kawasan, pemanfaatan dan system pengelolaan yang efektif. Salah satu kebutuhan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang cukup mendasar adalah penataan zonasi dengan mempertimbangkan ekosistem dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menjalankan fungsi kawasan pelestarian alam dan didukung secara penuh oleh semua pihak (stakeholder).

Proses menuju pengelolaan yang efektif dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang tidak bisa dipisahkan. Langkah-langkah koordinasi lintas sektor dan koordinasi teknis perlu secara rinci diidentifikasi dan dijalankan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor. Harapan kedepan adalah partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk mendukung manajemen kawasan konservasi perairan sehingga dapat mengemban fungsinya dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Keterpaduan langkah dari seluruh pihak diharapkan mampu mempertajam aspek-aspek penataan zonasi (biofisik, social ekonomi masyarakat, kelembagaan, rencana pembangunan daerah).

a. Identifikasi Isu

Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu dan masalah yang ada dan mungkin timbul yang berkaitan dengan keberadaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, kelembagaan, masyarakat dan pemanfaatan perikanan.

b. Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data antara lain dengan menggunakan kuesioner, semistructure-interview dan *focus group discussion* (FGD). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan data primer dari SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Data yang dikumpulkan antara lain:

- a. Data mengenai identifikasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan berupa data tabular dan data spasial yang mencakup:

- Kajian zonasi yang telah dibuat
 - Data kondisi biofisik, ekologi, sosial, ekonomi dan budaya
- b. Parameter biofisik dan ekologi antara lain :
- Iklim (angin, musim, curah hujan, dan lain-lain)
 - hidrooseanografi (kualitas air, pasang surut, arus, gelombang, dan lain-lain).
 - biota perairan (plankton, terumbu karang, ikan karang, rumput laut, padang lamun, dan mangrove).
- c. Parameter sosial, budaya, dan ekonomi antara lain :
- Jumlah dan kepadatan penduduk,
 - Tingkat pendidikan,
 - Kesehatan masyarakat,
 - Kelembagaan masyarakat,
 - Etnik, seni dan budaya lokal,
 - Sarana dan prasarana daerah,
 - Mata pencaharian dan tingkat pendapatan.
 - Pengelolaan sumberdaya alam
 - Pola pemanfaatan sumberdaya alam
- d. Parameter pengelolaan SAP antara lain :
- Parameter kelemahan, kekuatan , peluang dan ancaman pada pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
 - Rekomendasi strategi pengelolaan

c. Proses Penyusunan Zonasi

Proses penyusunan zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Analisis data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi masing-masing parameter data. Kondisi masing-masing parameter data tersebut selanjutnya menjadi input pada proses pemilihan zona dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Proses pemilihan zona atau rencana zonasi pada SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada tahap analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MARXAN dan teknik tumpang susun (overlay). Kedua perangkat lunak tersebut sifatnya hanya untuk membantu pengambilan keputusan (decision support system) untuk memilih beberapa lokasi yang akan menjadi zona inti di dalam kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Hasil utama dari analisis MARXAN berupa identifikasi daerah-daerah dengan nilai konservasi yang tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang rendah. Dengan demikian parameter masukan dalam analisis ini adalah nilai penting suatu kawasan dan beban biaya pengelolaan. Nilai penting kawasan diperoleh dari kriteria-kriteria biofisik dan social yang juga merupakan kriteria zona inti dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, sementara beban biaya adalah pengaruh negative aktivitas social masyarakat terhadap konservasi, dimana semakin tinggi pengaruh negative suatu aktivitas semakin tinggi pula angka yang diberikan, dan sebaliknya.

2) Proses Partisipatif

Proses ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi serta mencari masukan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Wujud dari proses ini berupa konsultasi public dan/atau pertemuan-pertemuan di tingkat komunitas, dengan materi masukan adalah hasil analisis rencana zonasi yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Desain Zonasi

Desain untuk rencana zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat berdasarkan pada analisis dari data yang telah tersedia sesuai dengan pedoman dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, tujuan dan kriteria desain (biofisik, resilien, dan sosial ekonomi) untuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Metode yang dipakai dalam kajian zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah Analisis Marxan. Analisis Marxan merupakan pemodelan spasial ekosistem dengan basis sistem informasi geografis (Geselbracht *et al.*, 2005 serta Barmawi dan Darmawan, 2007). Langkah-langkah dalam Analisis Marxan adalah:

- 1) Menentukan parameter ekologi yang akan dijadikan target spasial dan parameter yang akan dijadikan sebagai biaya. Parameter biaya yang dimaksud adalah parameter yang dianggap sebagai parameter yang memberikan dampak negatif bagi kegiatan konservasi laut.
- 2) Membuat Area of Interest (AOI). AOI merupakan batas terluar kawasan yang akan dikaji.
- 3) Membuat satuan perencanaan dalam bentuk heksagonal di dalam AOI. Luas masing – masing satuan perencanaan adalah 1 – 10 hektar.

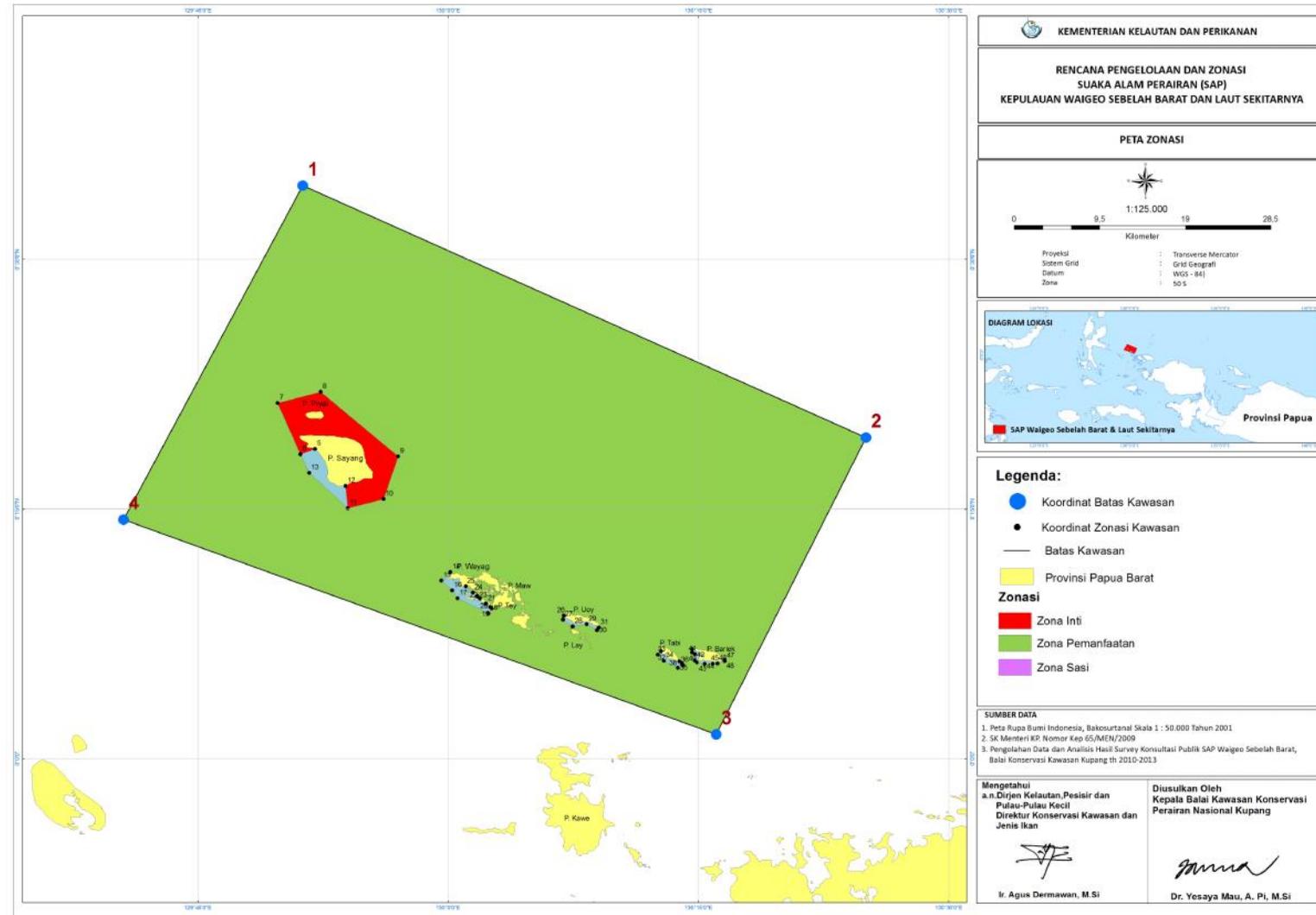
- 4) Memasukan parameter – parameter target dan biaya ke dalam satuan perencanaan.
- 5) Membuat konfigurasi file pendukung dari parameter yang telah dimasukkan dalam satuan perencanaan.
- 6) Membuat berbagai macam skenario untuk memilih area prioritas.
- 7) Mensimulasikan skenario untuk menentukan satuan perencanaan terpilih sebagai area prioritas. Area prioritas yang terpilih merupakan area prioritas dengan skenario yang sesuai dan nilai total biaya terendah. Nilai total biaya dihitung dengan rumus (Huggins, 2006):

$$TB = BSP + BKK + PKA$$

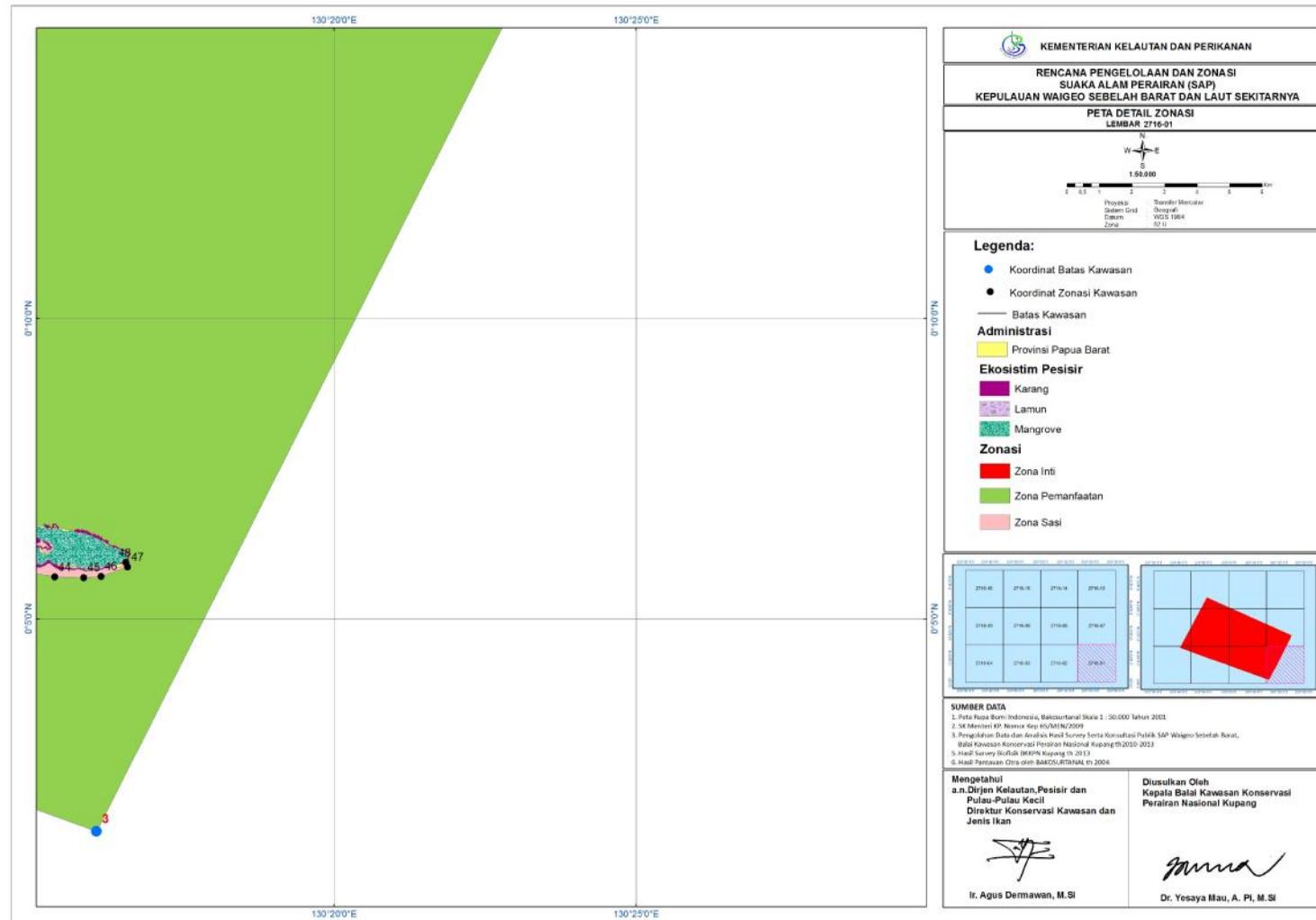
TB : Total biaya,
BSP : Biaya satuan perencanaan yang dikeluarkan,
BKK : Biaya kegiatan berdampak negatif terhadap konservasi,
PKA : Panjang keliling area.

Zonasi di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Penetapan zonasi didasarkan pada berbagai hasil studi dan analisis yang mendalam, *ground-truthing* dan konsultasi publik dengan *stakeholder* terkait di tingkat kabupaten, desa dan dusun di kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

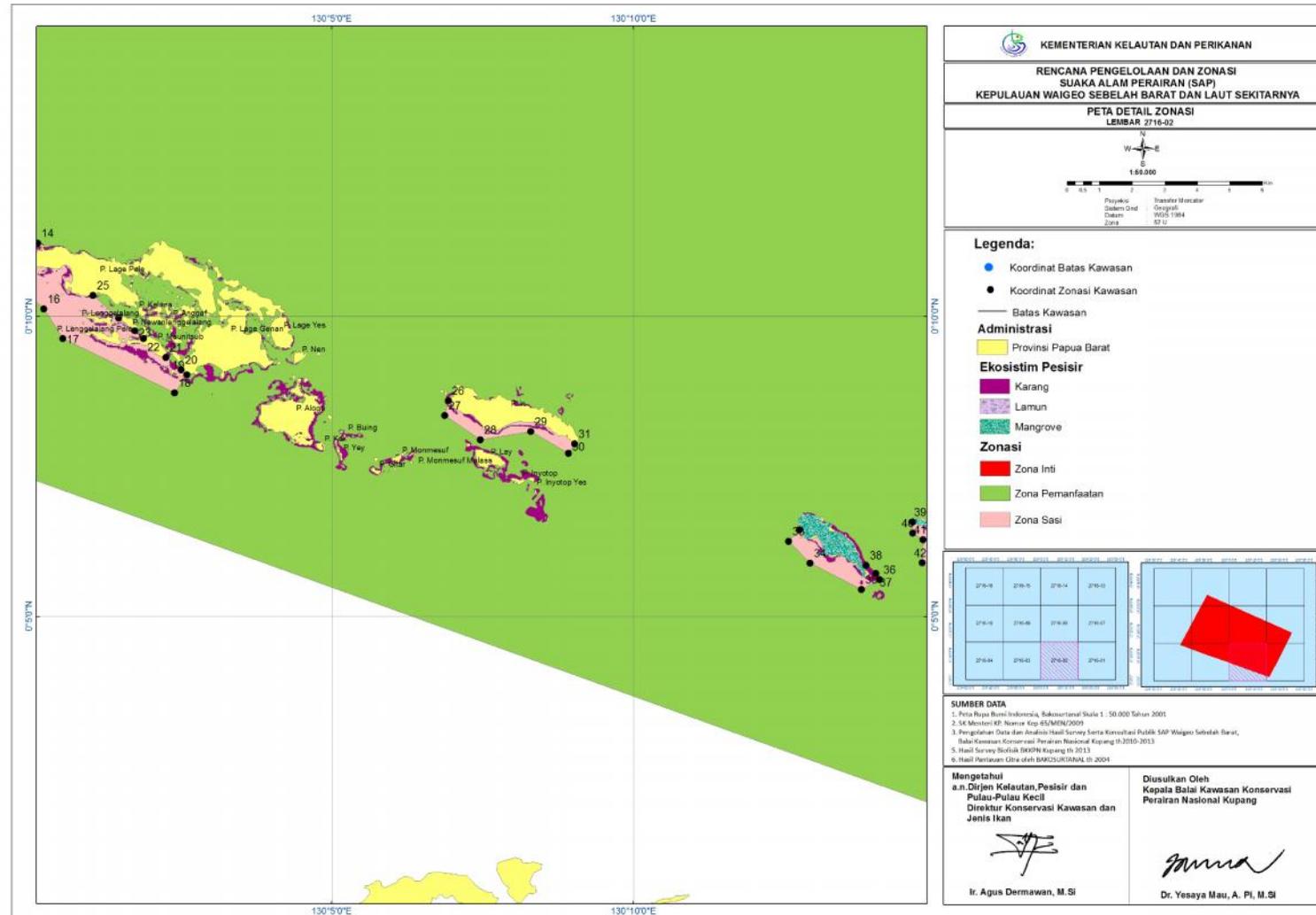
Luas Kawasan Konservasi Perairan Nasional SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah 125.000 ha, penetapan zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi kawasan pada Gambar 2. (Peta Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan skala 1 : 125.000) dengan titik koordinat batas kawasan yang dapat dilihat pada Tabel 2, serta peta detail zonasi pada Gambar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan Gambar 3.10. (Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan skala 1 : 50.000) dalam berikutnya.



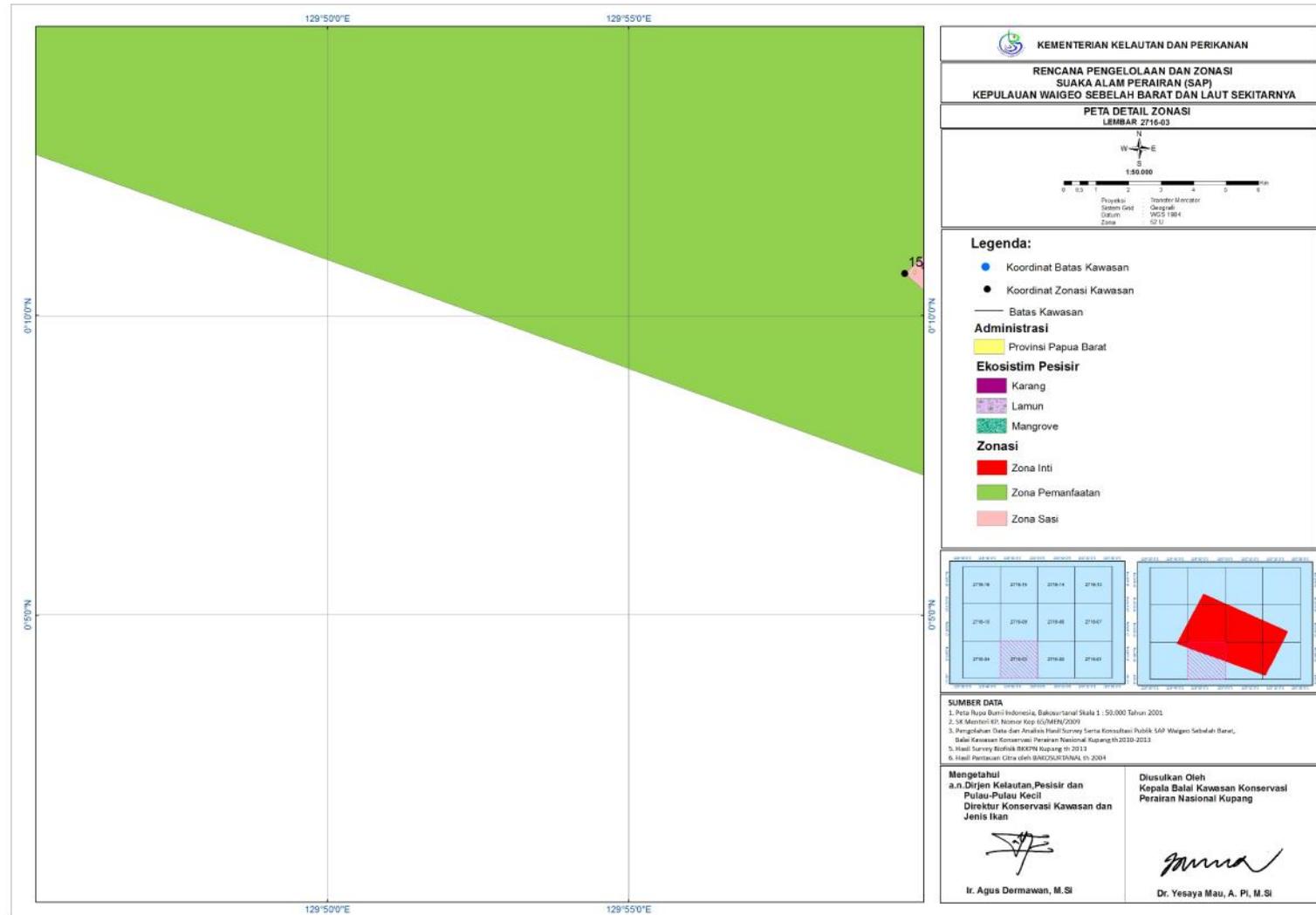
Gambar 2. Peta Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



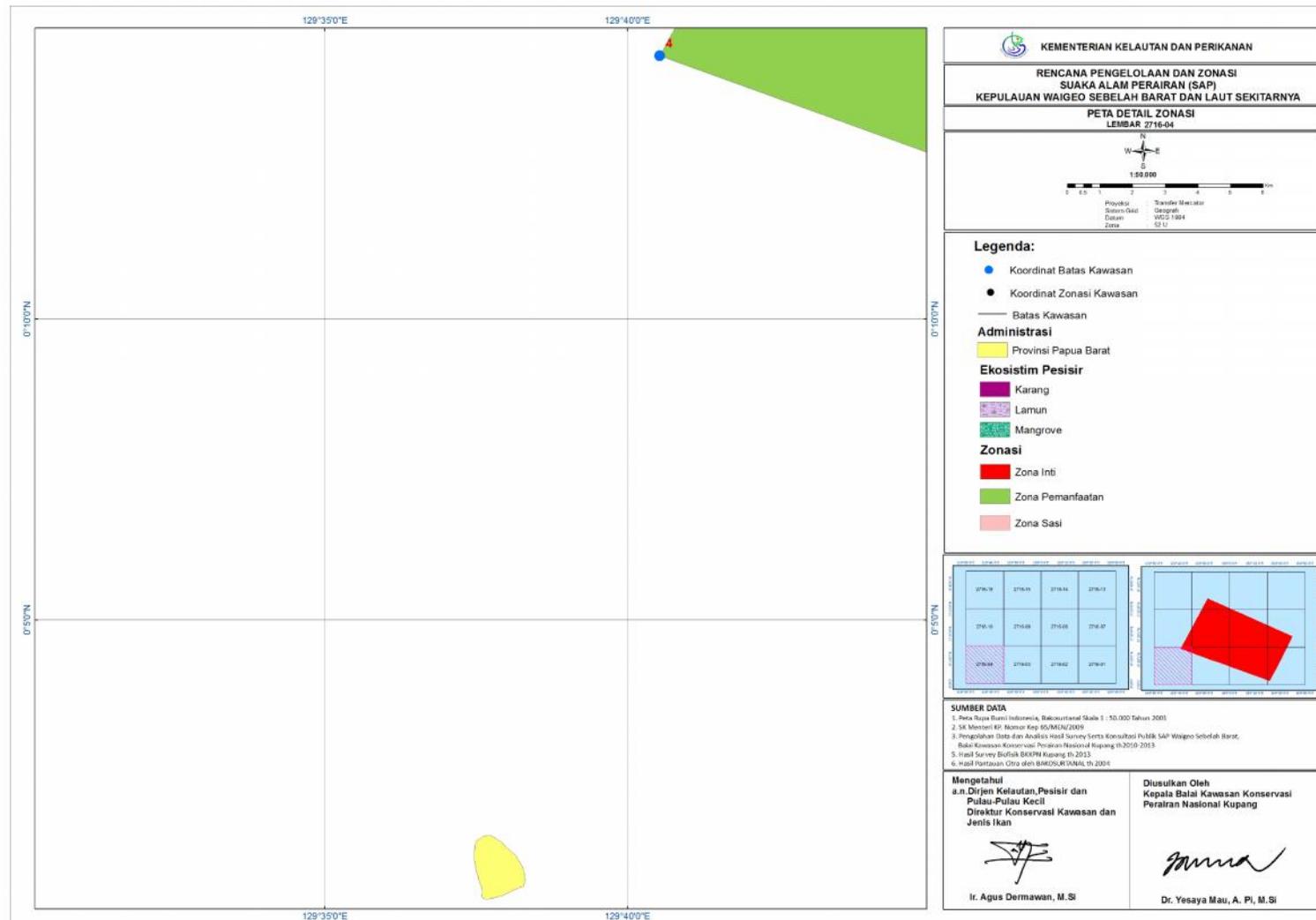
Gambar 3.1. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



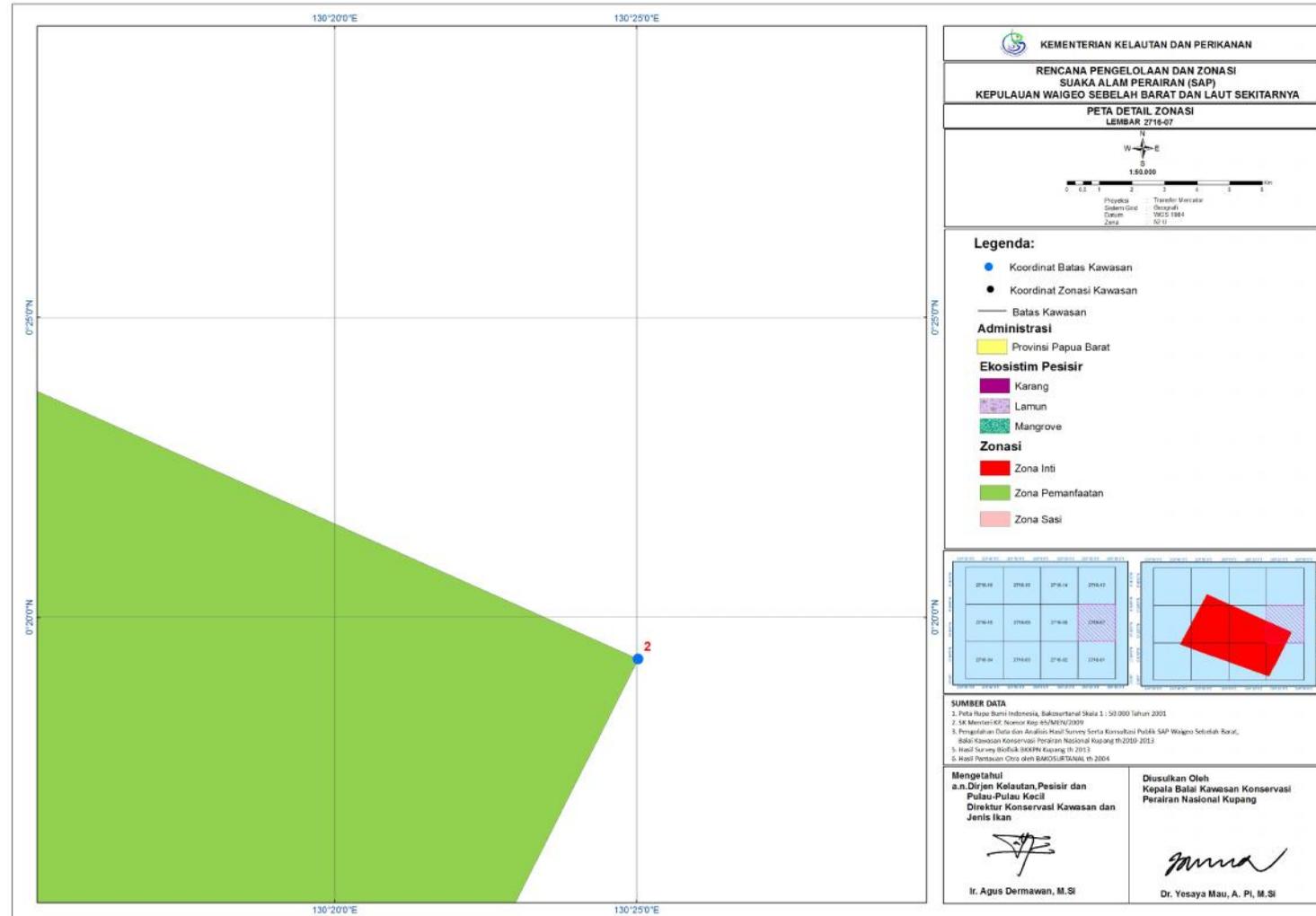
Gambar 3.2. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



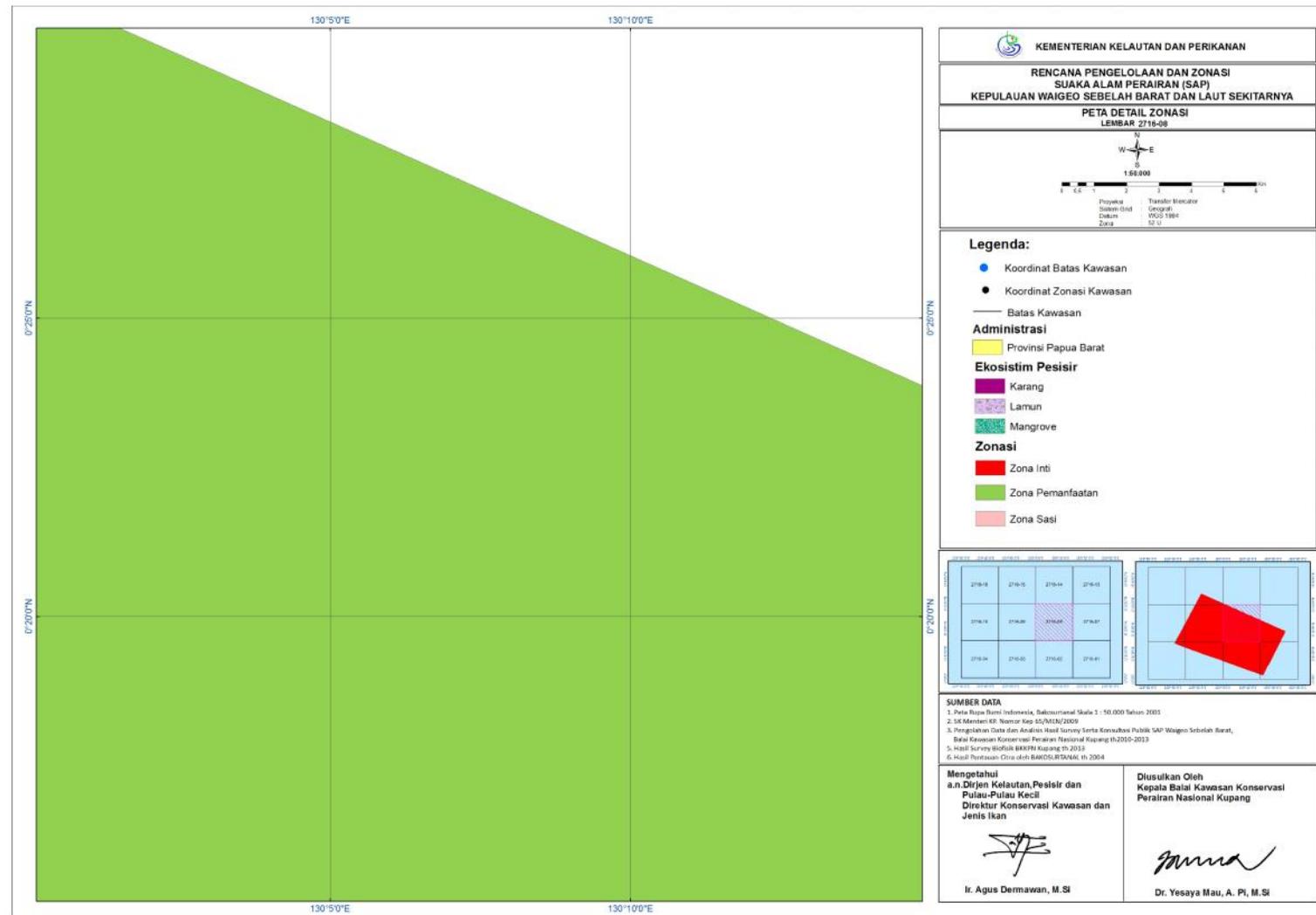
Gambar 3.3. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



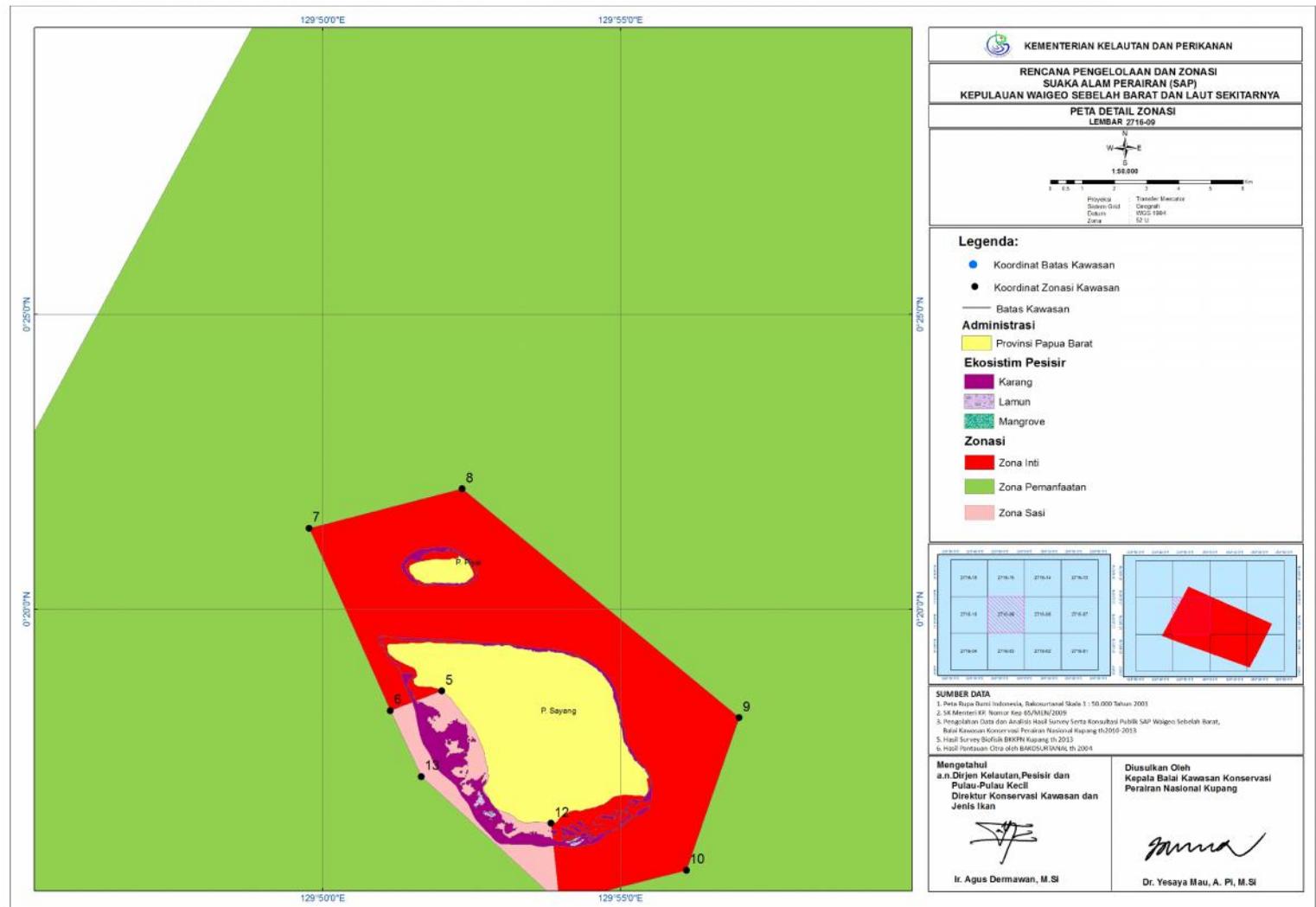
Gambar 3.4. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



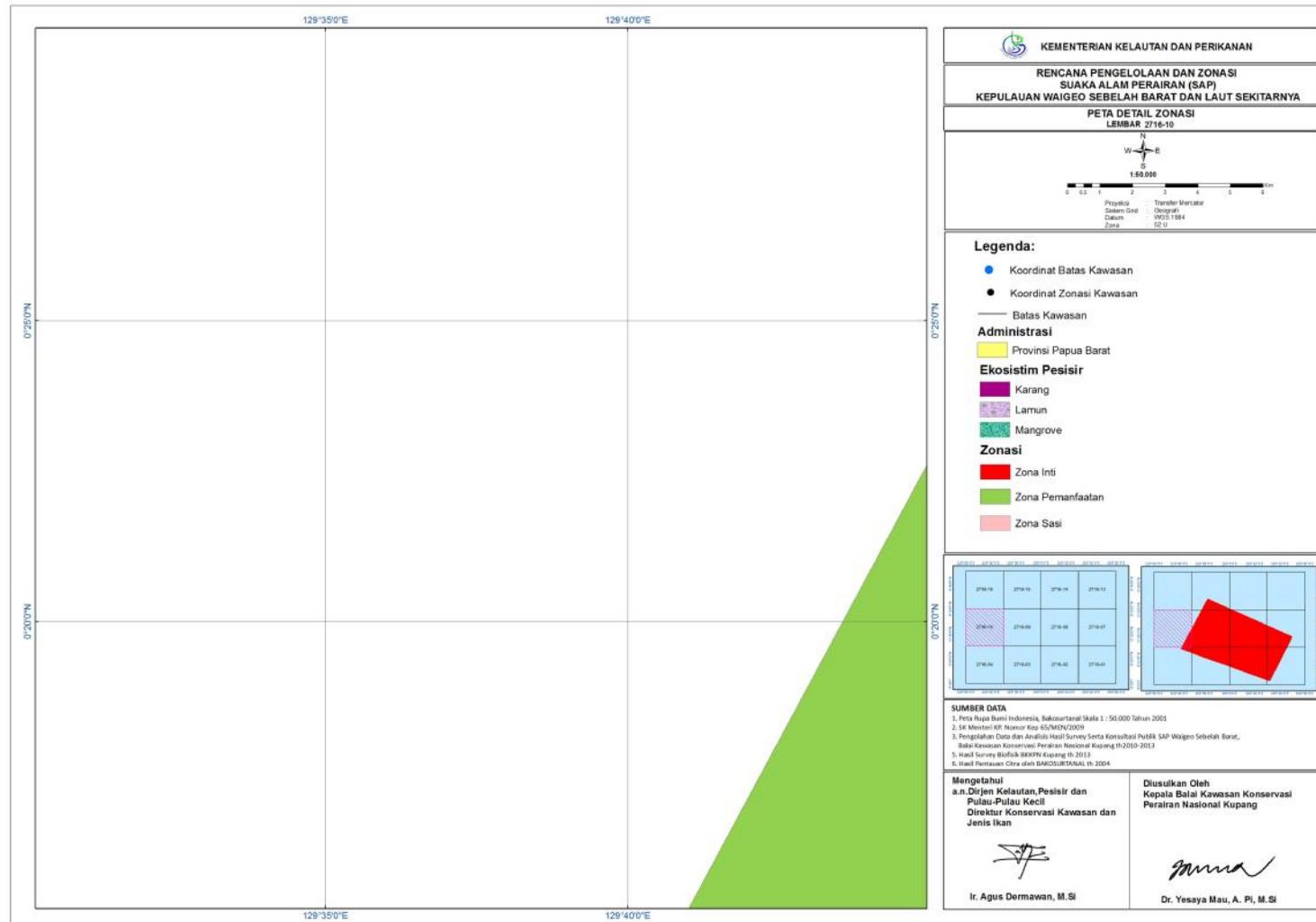
Gambar 3.5. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



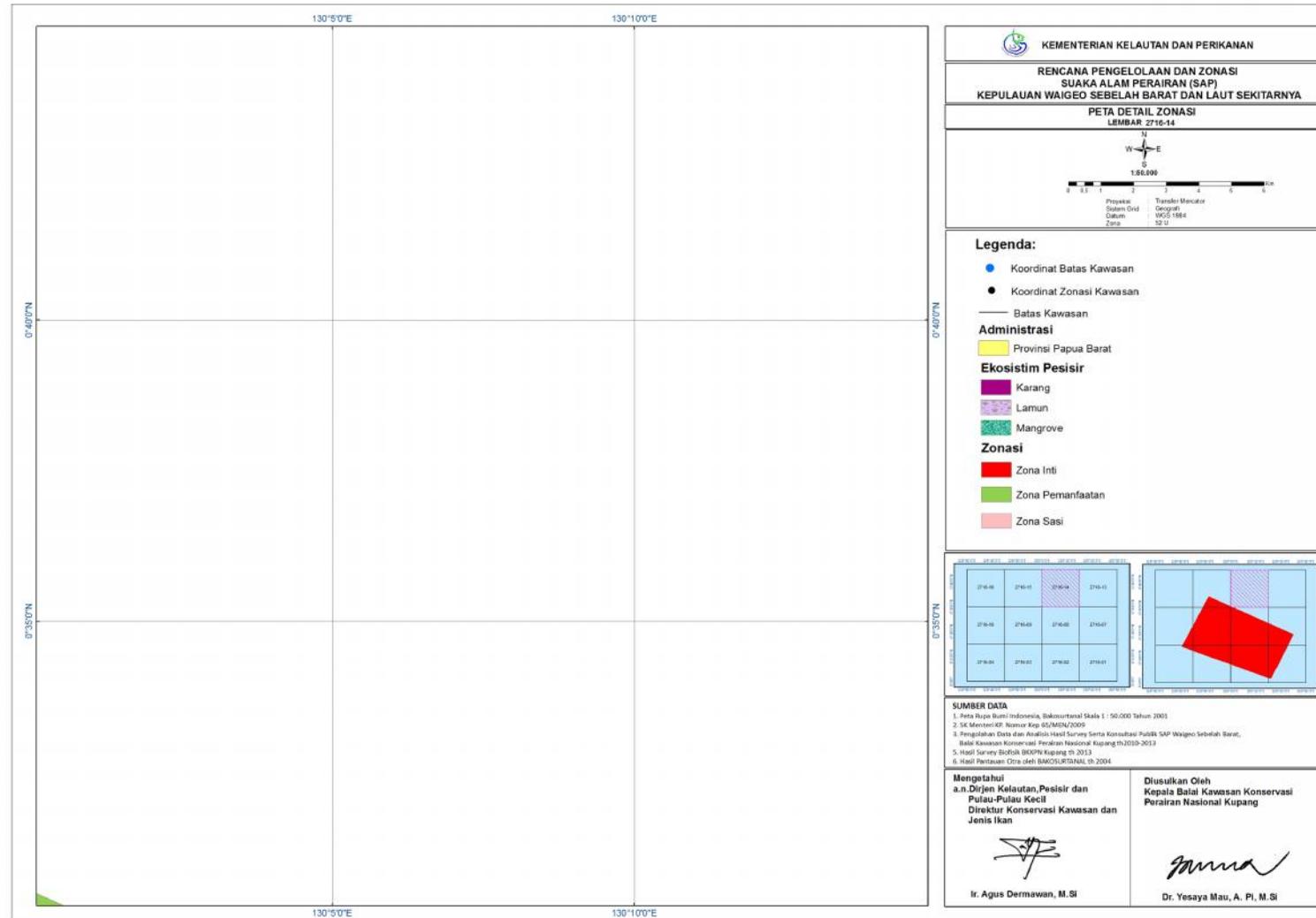
Gambar 3.6. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



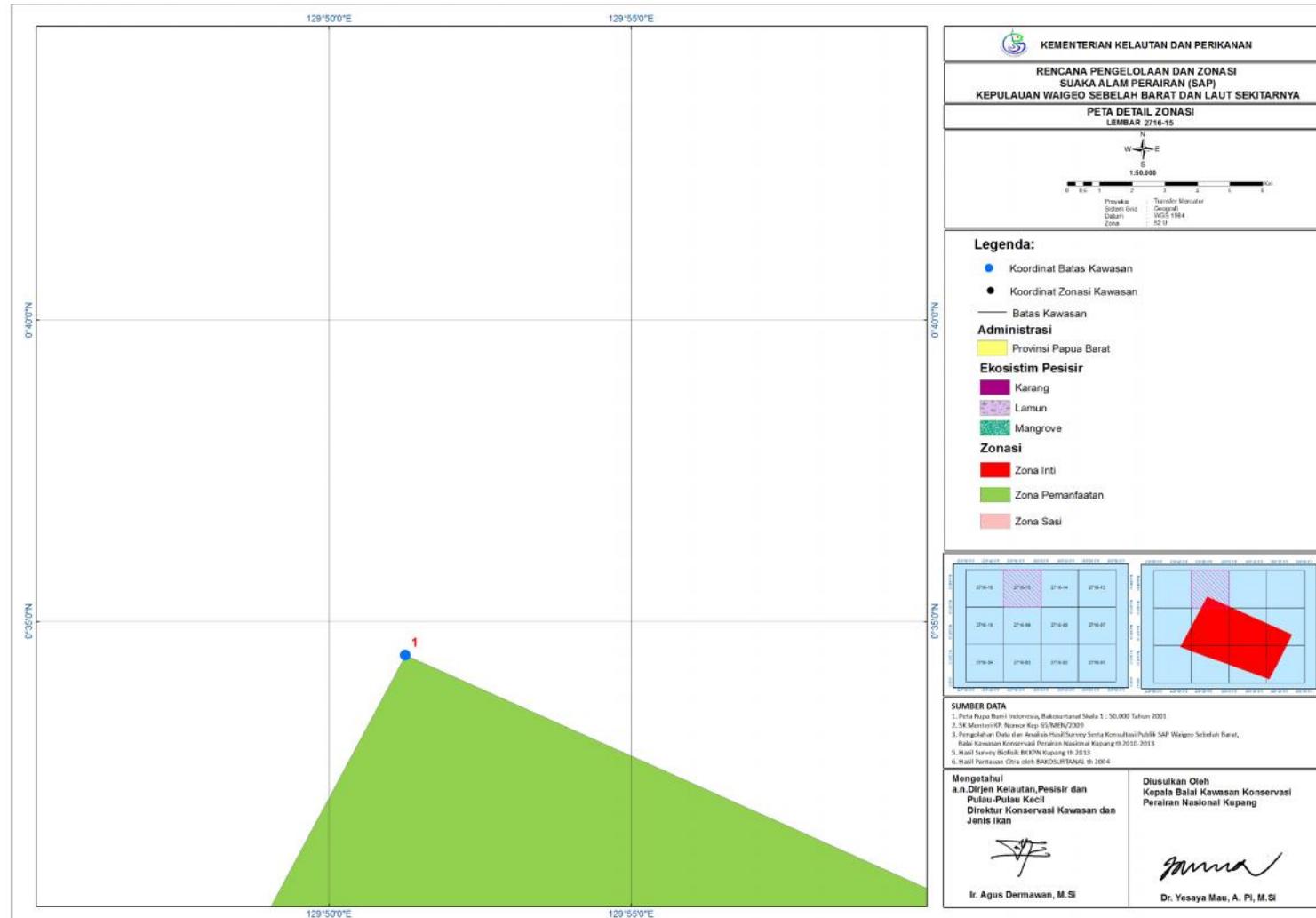
Gambar 3.7. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



Gambar 3.8. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



Gambar 3.9. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat



Gambar 3.10. Peta Detail Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Tabel 2. Koordinat kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Nomor Titik Koordinat	Koordinat	
	X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)
1	129° 51' 16.21" BT	0° 34' 26.32" LU
2	130° 25' 01.80" BT	0° 19' 18.30" LU
3	130° 16' 04.00" BT	0° 01' 28.00" LU
4	129° 40' 32.00" BT	0° 14' 22.00" LU

Sistem zonasi dalam kawasan konservasi perairan nasional SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dibagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya yaitu zona sasi yang memiliki potensi, peruntukan/tujuan zona dan kegiatan yang boleh dan tidak boleh untuk masing-masing zona sebagaimana dijelaskan secara detail di sub bab di bawah ini.

B. Zona inti

1. Rancangan Zona Inti

Kawasan Konservasi Perairan yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui keputusan menteri, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembagian zonasi, penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola kawasan tersebut. Proses zonasi hendaknya didasarkan pada kajian ilmiah dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah diakui oleh para ahli. Kriteria yang dipakai dalam proses zonasi diantaranya meliputi:

1. Adanya keterwakilan ekosistem dan ulangan habitat yang dikonservasi;
2. Ukuran yang tidak terlalu kecil;
3. Persentasi habitat penting yang dilindungi mencapai sekitar 30%;
4. Pemilihan lokasi yang masih virgin atau dalam kondisi sangat baik;
5. Secara sosial ekonomi, sejauh mungkin zona inti berada jauh dari pusat permukiman penduduk (modifikasi dari Mouse, 2007).

Zona inti dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat terletak di perairan sekitar Pulau Sayang dan Pulau Ai dengan habitat utama

terumbu karang. Zona inti kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat sudah memenuhi kriteria zona inti untuk kawasan konservasi perairan yaitu seluas 5.795,4 ha (2,13% dari total luas kawasan), yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. dengan titik koordinat lokasi zona inti dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah in.

Tabel 3. Koordinat Zona Inti SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Lokasi	Nomor	Koordinat		Luas (Ha)
	Titik Koordinat	X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)	
Di perairan P. Sayang	5	129° 52' 00.14" BT	0° 18' 37.02" LU	5.795,4
	6	129° 51' 08.14" BT	0° 18' 17.17" LU	
	7	129° 49' 46.30" BT	0° 21' 22.60" LU	
	8	129° 52' 20.68" BT	0° 22' 02.53" LU	
	9	129° 56' 59.84" BT	0° 18' 10.00" LU	
	10	129° 56' 06.77" BT	0° 15' 35.69" LU	
	11	129° 53' 58.43" BT	0° 15' 02.92" LU	
	12	129° 53' 50.32" BT	0° 16' 22.65" LU	

2. Potensi Zona Inti

Secara umum kondisi potensi ekologi di zona inti SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.7, dengan tutupan terumbu karang hidup di zona inti mencapai 55 %. SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah daerah penting sekali untuk ruaya Paus, Penyu Hijau, Penyu Sisik, ikan hiu, dan pari manta. Pulau Sayang-Wayag adalah daerah sangat penting dari sisi bertelur Penyu Hijau. Daerah ini juga menjadi daerah perlindungan penyu, dan tingkat keberhasilan penetasan telur penyu semakin meningkat. Selain itu, potensi lainnya dari zona inti SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Lokasi zona inti SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan wilayah pantai peneluran penyu hijau dan penyu sisik yang produktif, habitat optimal untuk Hiu Karang dan Hiu Oseanik, udang lobster, teripang, lola, dan ikan kerapu, pari manta.

3. Peruntukan / Tujuan Zona Inti

Zona inti dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta penelitian dan pendidikan. Zona inti yang terdapat di kawasan konservasi

perairan nasional SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat memiliki potensi dan keterwakilan ekosistem penting seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun.

Zona Inti SAP Raja Ampat adalah kawasan yang hanya diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta penelitian dan pendidikan.

- a. Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan meliputi: perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya; penjagaan, pengawasan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan.
- b. Kegiatan penelitian yang diperbolehkan yaitu: penelitian dasar menggunakan metode naturalistik untuk tujuan pengumpulan data dasar kondisi biologis dan ekologis; penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologis dan ekologis.
- c. Kegiatan pendidikan diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh

Kegiatan yang boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan dimasing-masing zona sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan yang Boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan di zona inti pada SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
Kegiatan yang diperbolehkan	1	Patroli pengawasan
	2	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (Pos Jaga, Jetty)
Kegiatan yang diperbolehkan tetapi dengan izin	1	Monitoring dan Penelitian non ekstraktif
	2	Pendidikan pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati (ekosistem lamun, mangrove, terumbu dan laut dalam); perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan
Kegiatan yang	1	Monitoring dan Penelitian ekstraktif

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
tidak diperbolehkan	2	Tambatan perahu
	3	Pembangunan Infrastruktur wisata hotel, home stay, dan sarana penginapan lainnya
	4	Pembangunan Infrastruktur wisata (resor permanen)
	5	Pembangunan Rumah Adat
	6	Infrastruktur Pengelolaan Kawasan (kantor)
	7	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan (kapal layar (cruise), kapal selam, sea walker, penenggelaman kapal (ship wreck)
	8	Rekreasi pantai
	9	Wisata menyelam
	10	Wisata snorkeling
	11	Wisata Jet Ski
	12	Wisata Kayak/Dayung
	13	Wisata Surfing
	14	Wisata Kite surfing
	15	Wisata Mancing (Catch and Release)
	16	Wisata perahu kaca (glass boat)
	17	Perahu wisata
	18	Wisata melihat Paus dan Lumba-Lumba
	19	Wisata melihat burung
	20	Wisata mangrove
	21	Wisata Budaya
	22	Wisata tracking
	23	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
	24	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
	25	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang tetap (Set gill nets (anchored))
	26	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang hanyut (Drift nets)
	27	Penangkapan Ikan dengan Jaring insang oseanik
	28	Penangkapan Ikan dengan Jaring angkat (Lift Net)
	29	Penangkapan Ikan dengan Jaring serok (scoop net)
	30	Penangkapan Ikan dengan Bagan Tancap (bamboo platform lift net)
	31	Penangkapan Ikan dengan Bagan Perahu/rakit (Boat/raft lift net)
	32	Penangkapan Ikan dengan Bubu
	33	Penangkapan Ikan dengan Pancing ulur
	34	Penangkapan Ikan dengan Pancing tonda
	35	Penangkapan Ikan dengan Pancing layang-layang
	36	Penangkapan Ikan dengan Sero
	37	Penangkapan Ikan dengan Jermal
	38	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tuna
	39	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hanyut
	40	Penangkapan Ikan dengan Rawai Tetap

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
	41	Penangkapan Ikan dengan Rawai Hiu/Cucut
	42	Penangkapan Ikan dengan Huhate
	43	Makameting (dengan alat dan cara yang tidak merusak terumbu karang)
	44	Pemasangan Rumpon
	45	Rumpon telur ikan terbang
	46	Menggunakan bahan beracun, kompresor dan bom
	47	Menangkap Ikan Hias
	48	Menangkap ikan dengan senapan dan tombak
	49	Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan artisanal serta kelompok nelayan yang secara ekonomis memiliki struktur dan unit usaha kecil yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha penangkapan ikan
	50	Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh usaha menengah keatas
	51	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
	52	Lampara dasar
	53	Penangkapan Ikan dengan Kapal 5 - 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	54	Penangkapan Ikan dengan Kapal < 5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan
	55	Menangkap, melukai dan membunuh biota yang dilindungi (termasuk penyu, buaya, manta, duyung, hiu, paus, lumba-lumba, dll)
	56	Mengambil dan menjual telur penyu
	57	Budidaya Rumput Laut
	58	Budidaya Mutiara
	59	Budidaya dengan Keramba Jaring Apung (KJA)
	60	Budidaya Teripang
	61	Budidaya Lobster
	62	Membangun Tambak
	63	Alur Kapal untuk perhubungan
	64	Pelayaran selain di alur kapal untuk perhubungan
	65	ALKI III
	66	Penebangan Mangrove
	67	Pengambilan Karang hidup atau mati
	68	Pengambilan Karang hidup atau mati dalam aktifitas keruga (kearifan lokal Sabu Rajjua) hanya boleh dilakukan setahun sekali dalam satu hari dan waktunya diatur oleh kesepakatan adat.
	69	Penambangan Pasir Laut
	70	Survey Seismic Minyak dan Gas
	71	Penambangan Minyak dan Gas
	72	Pembuangan Limbah dan Sampah

C. Zona Pemanfaatan

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona Pemanfaatan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian jenis dan daya tarik pariwisata bahari dan rekreasi;
- c. Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi;
- d. Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya;

Zona Pemanfaatan dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat merupakan zona yang paling luas, yaitu seluas 258.733 ha (95,25% dari total luasan kawasan). Zona pemanfaatan kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat teridentifikasi sekitar 705 ha (sekitar 20,4%) ekosistem terumbu karang, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2. dengan titik koordinat lokasi zona pemanfaatan dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Koordinat Zona Pemanfaatan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Nomor Titik Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
	X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)	
1	129° 51' 16.21" BT	0° 34' 26.32" LU	258.733
2	130° 25' 01.80" BT	0° 19' 18.30" LU	
3	130° 16' 04.00" BT	0° 01' 28.00" LU	
4	129° 40' 32.00" BT	0° 14' 22.00" LU	

2. Potensi di Zona Pemanfaatan

Secara umum kondisi potensi ekologi di Zona Pemanfaatan dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1 – 3.10. Potensi yang ada di Zona Pemanfaatan dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat terdiri dari tutupan terumbu

karang hidup mencapai 70%, sangat potensial untuk menyelam dan snorkeling, terdapat pantai peneluran penyu, feeding ground penyu, habitat dan nursery ground untuk Hiu, Pari Manta, terdapat banyak ikan kerapu, *Bumphead Parrot Fish*, Napoleon, Kakap dan berbagai ikan hias, merupakan Habitat optimal untuk tiga biota sasi untuk lobster.

SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat memiliki gugusan bukit-bukit karst yang lancip yang “tumbuh” dari laut sehingga mempesona, lagoon, dan danau air asin dan ubur-ubur yang tidak menyengat. Pantai pasir putih, lokasi gurita keramat, terdapat berbagai situs sejarah.

3. Peruntukan / Tujuan Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan. Peruntukan Zona Pemanfaatan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan yang diperbolehkan meliputi: perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan daya dukung habitatnya; perlindungan alur migrasi biota perairan; pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- b. Kegiatan pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, menyelam; pariwisata tontonan seperti snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass bottom boat); pariwisata minat khusus; perahu pariwisata; olahraga permukaan air seperti berenang, dayung/kayak dan jenis olahraga air lainnya; wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti mengamati kehidupan biota perairan (penyu, ikan dan lain-lain), formasi kehidupan terumbu karang, mangrove, burung dan lainlain; wisata budaya, tracking dan pembuatan foto, video dan film.

- c. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan meliputi: penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi.
- d. Kegiatan pendidikan meliputi: pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati; perlindungan sumberdaya masyarakat lokal; pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan Suaka Alam Perairan.

4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh dilakukan

Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam zona pemanfaatan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat secara rinci di lihat pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Kegiatan yang Boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan di zona Pemanfaatan pada SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
Kegiatan yang boleh dilakukan	1	Wisata Menyelam
	2	Berenang dan Snorkling
	3	Wisata watersport:
	4	Wisata Perahu Kaca (<i>Glass Bottom Boat</i>)
	5	Berlayar melintas
	6	Tambatan kapal (<i>Muoring buoy</i>)
	7	Upacara adat, ritual keagamaan
	8	Aktifitas Penangkapan Ikan, salah satunya seperti Pancing cumi pada malam hari (tidak buang jangkar)
	9	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan non komersial
Kegiatan yang boleh dilakukan dengan izin	1	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan - marine walk

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
		- penenggelaman kapal (ship wreck)
	2	Penelitian
Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
Kegiatan yang boleh tetapi dengan izin	3	Pendidikan, Pemeliharaan, Pemulihan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Ekosistemnya
	4	Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial
Kegiatan yang tidak diperbolehkan	1	Wisata Speargun/Memanah Ikan
	2	Wisata watersport - Jetsky - Banana Boat - Windsurf - Wisata watersport lainnya
	3	Sarana dan pelayanan untuk melakukan wisata petualangan - kapal layar cruise, kapal selam
	4	Budidaya
	5	Berlabuh (Kapasitas kapal <10 GT)
	6	Berlabuh (Kapasitas Kapal >10 GT)
	7	Menyelam untuk mengambil biota
	8	Pengambilan karang hidup atau mati
	9	Aktifitas Penangkapan Ikan: - Pancing - Jaring Atas - Panah/Speargun - Rawai Dasar - Mengambil biota/angsat (gleaning) - Jaring terinjang (gill net) - Bagan Lampu - Jaring Trawl, Jaring Muro ami, Huhate (pole & line), Payang, Bubu, Akar Tuba, Sianida, Bom/Bahan Peledak dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya

Perumusan Kegiatan	No	Jenis Kegiatan
	10	Penangkapan ikan dengan menggunakan kompressor
	11	Pemasangan Rumpon

D. Zona Sasi

1. Rancangan Zonasi dan Koordinat

Masyarakat Raja Ampat juga melaksanakan sistem pengelolaan sumber daya darat dan laut tradisional yang disebut dengan “sasi”. Sasi untuk wilayah laut sering berupa pelarangan tangkapan untuk jenis-jenis tertentu pada kurun waktu tertentu pula (misalnya teripang, Trochus atau lobster), bisa juga penutupan wilayah tangkap tertentu (atau sekaligus dengan jenis-jenis tertentu) selama 6 bulan hingga 5 tahun (McLeod *et al.*, 2009). Pada kebanyakan masyarakat Raja Ampat yang mempraktekkan sasi, gereja dan mesjid seringkali memainkan peran penting dalam menetapkan aturan tentang penutupan wilayah dan penangkapan (termasuk durasi waktu, jenis yang boleh ditangkap, alat tangkap yang diijinkan, waktu penangkapan dan lokasinya, siapa saja yang diberi hak untuk melakukan penangkapan) dan pembagian hasil bersama. Seperti halnya dengan daerah lain di bagian timur Indonesia, praktek sasi semakin berkurang penerapannya oleh masyarakat Raja Ampat, namun baru-baru ini telah direvitalisasi kembali sebagai hasil dari inisiatif pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Sebagai wilayah petuanan, penduduk kampung Sarpele dan Salio memiliki sasi khusus lola, lobster dan teripang di perairan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Sasi tersebut terdapat di perairan sekitar Pulau Uranie, Pulau Bag, Pulau Quoy dan Kepulauan Wayag. Sampai saat ini pemanfaatan sasi baru sekali dilaksanakan oleh penduduk dari kedua kampung selama 10 hari pada Oktober 2009. Waktu buka dan tutup sasi serta alat tangkap dan cara penangkapan diatur melalui kesepakatan masyarakat.

Aturan Pelaksanaan Buka Sasi yang dilaksanakan pada awal November tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

1. Sasi hanya dibuka untuk 3 jenis biota yaitu lola, teripang dan udang lobster
2. Sasi dibuka selama 3 minggu

3. Pengambilan hasil Sasi hanl'a bisa dilakukan oleh masyarakat Selpele dan Salio saja
4. Dalam pengambilan hasil, tidak menggunakan kompresor, linggis, bore dan bius
5. Ukuran jenis biota yang diambil :
 - a. LoIa. Ukuran paling kecil sebesar 8 cm atau 3 jari.
 - b. Udang lobster. Dimana telur dan sperma yang putih dilepaskan kembali, dengan ukuran yang diperbolehkan harus lebih dari 0.5 kg, Jika dalam satu perahu, terdapat beberapa ekor lobster yang ada telurnya, semuanya harus tetap dilepaskan untuk keberlanjutan lobster di alam.
 - c. Teripang. Ukuran standart berbeda-beda. Namun yang pasti untuk ukuran kecil jangan diambil.
6. Tidak diperkenankan menangkap ikan atau biota laut lain selain point nomor 1, yaitu lola, teripang dan udang lobster. Ikan untuk konsumsi selama pengambilan hasil buka Sasi akan disuplai oleh panitia
7. Hasil pada hari pertama [mulai jam 7 malam sampai jam 5 pagi] adalah hasil sepersepuluh untuk 2 Gereja di Selpele dan Salio kemudian diserahkan kepada majelis jemaat masing-masing.
8. Upacara Buka Sasi secara gereja dan secara adat dilaksanakan pada hari yang sama.

Untuk proses upacara Tutup Sasi akan ditutup kembali pada hari terakhir dengan upacara penutupan seperti biasanya dimana panitia masih melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan seperti biasanya.

Zona Sasi dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat memiliki luas 2.166,84 ha yang tersebar di 5 (lima) lokasi. Zona sasi kawasan konservasi perairan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat memiliki potensi ekologi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1-3.9. dengan titik koordinat lokasi zona sasi dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Koordinat Zona Sasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)	
Perairan di sekitar P. Sayang	5	129° 52' 00.14" BT	0° 18' 37.02" LU	1.053.5
	6	129° 51' 08.14" BT	0° 18' 17.17" LU	
	11	129° 53' 58.43" BT	0° 15' 02.92" LU	
	12	129° 53' 50.32" BT	0° 16' 22.65" LU	

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)	
	13	129° 51' 39.41" BT	0° 17' 10.25" LU	
Perairan di sekitar wayag P.	14	130° 00' 07.80" BT	0° 11' 13.00" LU	650.71
	15	129° 59' 34.85" BT	0° 10' 42.39" LU	
	16	130° 00' 14.18" BT	0° 10' 07.34" LU	
	17	130° 00' 33.16" BT	0° 09' 37.75" LU	
	18	130° 02' 23.92" BT	0° 08' 43.59" LU	
	19	130° 02' 36.52" BT	0° 09' 01.70" LU	
	20	130° 02' 30.58" BT	0° 09' 06.39" LU	
	21	130° 02' 15.48" BT	0° 09' 18.75" LU	
	22	130° 01' 53.08" BT	0° 09' 37.64" LU	
	23	130° 01' 44.52" BT	0° 09' 45.64" LU	
	24	130° 01' 28.40" BT	0° 09' 58.34" LU	
	25	130° 01' 02.97" BT	0° 10' 20.92" LU	
Perairan di sekitar Quoy P.	26	130° 06' 55.89" BT	0° 08' 35.84" LU	149.32
	27	130° 06' 52.46" BT	0° 08' 20.82" LU	
	28	130° 07' 27.72" BT	0° 07' 56.69" LU	
	29	130° 08' 17.91" BT	0° 08' 04.88" LU	
	30	130° 08' 55.43" BT	0° 07' 43.04" LU	
	31	130° 09' 01.37" BT	0° 07' 52.53" LU	
Perairan di sekitar P. Bag	32	130° 12' 44.67" BT	0° 06' 26.74" LU	152.28
	33	130° 12' 33.77" BT	0° 06' 15.19" LU	
	34	130° 12' 55.47" BT	0° 05' 53.34" LU	
	35	130° 13' 46.10" BT	0° 05' 26.95" LU	
	36	130° 14' 04.20" BT	0° 05' 37.00" LU	
	37	130° 14' 00.57" BT	0° 05' 42.87" LU	
	38	130° 13' 50.88" BT	0° 05' 51.19" LU	
Perairan di sekitar Urani P.	39	130° 14' 37.20" BT	0° 06' 34.36" LU	161.03
	40	130° 14' 37.20" BT	0° 06' 23.38" LU	
	41	130° 14' 47.58" BT	0° 06' 16.55" LU	
	42	130° 14' 46.68" BT	0° 05' 53.79" LU	

Lokasi	No. Koordinat	Koordinat		Luas (Ha)
		X (Bujur Timur)	Y (Lintang Utara)	
	43	130° 14' 54.36" BT	0° 05' 46.97" LU	
	44	130° 15' 22.55" BT	0° 05' 42.09" LU	
	45	130° 15' 51.35" BT	0° 05' 41.40" LU	
	46	130° 16' 08.50" BT	0° 05' 42.78" LU	
	47	130° 16' 34.72" BT	0° 05' 51.97" LU	
	48	130° 16' 33.13" BT	0° 05' 56.56" LU	

2. Potensi Zona Sasi

Secara umum kondisi potensi ekologi di Zona sasi dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2. Zona sasi merupakan zona tangkap ikan yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat tradisional yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap tradisional skala kecil untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional dan menggunakan sistem buka tutup.

Potensi yang ada di Zona sasi dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Tabel potensi zona Sasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Zona	Potensi
Zona Sasi (p sayang)	Tutupan Terumbu karang hidup mencapai 40%, feeding ground penyu hijau dan sisik, habitat optimal untuk teripang lola dan lobster,
Zona Sasi (wayag)	Tutupan Terumbu karang mencapai 60%, merupakan daerah feeding ground penyu, optimal untuk habitan teripang, lola dan lobster
Zona Sasi (quoy)	Tutupan Terumbu karang mencapai 40%, merupakan daerah feeding ground penyu, optimal untuk habitan teripang, lola dan lobster
Zona Sasi (Bag)	Tutupan Terumbu karang mencapai 40%, merupakan daerah feeding ground penyu, optimal untuk habitat teripang, lola dan lobster
Zona Sasi (Urani)	Tutupan Terumbu karang mencapai 40%, merupakan daerah feeding ground penyu, optimal untuk habitan teripang, lola dan lobster

3. Panduan Kegiatan

Beberapa aturan dalam sub-zona perikanan tradisional dalam SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat adalah sebagai berikut:

- b. Pemanfaatan sumberdaya perairan hanya untuk masyarakat Kampung Selpele dan Salio.
- c. Sumberdaya yang boleh dimanfaatkan hanya lola, teripang dan lobster dengan ukuran yang disepakati bersama masyarakat..
- d. Waktu buka dan waktu tutup daerah sasi atau daerah pemanfaatan tradisional melalui kesepakatan bersama masyarakat.
- e. Evaluasi pelaksanaan buka Sasi untuk menentukan buka sasi berikutnya
- f. Harga dan pembeli melalui kesepakatan bersama masyarakat.
- g. Alat tangkap tradisional yang digunakan saat buka sasi melalui kesepakatan bersama masyarakat.
- h. Pelarangan penggunaan alat kompresor, linggis dan alat lain yang bersifat merusak pada saat buka sasi.
- i. Sanksi adat bagi pelanggar kesepakatan.

Tabel 10. Aturan zonasi untuk beberapa kegiatan-kegiatan dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Kegiatan	ZI	ZP	ZS
Inventarisasi dan kajian sumberdaya(baseline)	Y	Y	Y
Penelitian oleh pengelola	Y	Y	Y
Penelitian oleh pihak luar pengelola	YP	YP	YP
Monitoringt sumberdaya oleh pengelola	Y	Y	Y
Pendidikan Lingkungan (didampingi pengelola)	YP	YP	YP
Rehabilitasi sumberdaya	Y	Y	Y
Penambahan stok sumberdaya	Y	Y	Y
Pengendalian hama dan penyakit	Y	Y	Y
Pengawasan	Y	Y	Y
Pembangunan infrastruktur besar pengelola (kantor)	N	Y	N
Pembangunan infrastruktur kecil pengelola (shelter)	N	Y	Y
Pembangunan fasilitas pengunjung (tanda-tanda)	N	Y	Y

Kegiatan	ZI	ZP	ZS
Pembangunan fasilitas wisata	N	Y	N
Pembangunan permukiman dan fasilitasnya	N	N	N
Kunjungan	N	Y	Y
Wisata mancing	N	N	Y
Wisata snorkeling and penyelaman	N	Y	Y
Wisata budaya	N	Y	Y
Whale/dolphin watching	N	Y	Y
Wisata mangrove	N	Y	Y
Perikanan bagan	N	N	N
Perikanan bubu/trap	N	N	N
Perikanan tradisional (<10 GT)	N	N	Y
Perikanan industri (>10 GT)	N	N	N
Usaha ikan hias	N	N	N
Budidaya ikan	N	N	N
Budidaya rumput laut	N	N	Y
Budidaya mutiara	N	N	N
Alur nelayan setempat	Y	Y	Y
Alur nelayan non setempat	N	Y	Y

Keterangan:

- ZI** : **Zona Inti**
ZP : **Zona Pemanfaatan**
ZS : **Zona Sasi**

BAB IV RENCANA JANGKA PANJANG

A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

1. Review Terhadap Kebijakan Nasional terkait dengan Suaka Alam Perairan

Landasan hukum dan kebijakan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya dengan mencadangkan kawasan konservasi laut. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan mengenai kawasan konservasi perairan dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk: (a) menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya; (c) melindungi habitat biota laut, dan (d) melindungi situs budaya tradisional. Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Pasal 28 ayat (4)). Sementara itu, untuk mencapai tujuan konservasi, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan: (a) Kategori Kawasan Konservasi; (b) Kawasan Konservasi Nasional; dan (c) Pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi, dan hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan dimaksud (Pasal 28 ayat (6)).

Sementara UU No. 31/2004 sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 menjelaskan tentang perlindungan sumber daya ikan sebagai berikut :

- *Pasal 1 angka 8: Konservasi Sumber daya Ikan adalah Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.*
- *Pasal 13 ayat (1) :Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan. Pemerintah dapat melakukan penetapan KK antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan .*

Terkait dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang harus dilindungi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Konservasi sumber daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Sementara Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan, ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi di wilayah yang dipandang perlu antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Mengenai kewenangan daerah dalam konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil, dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (4) dimana negara memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, dalam Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. (2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit organisasi pengelola. (3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. (4) Zonasi kawasan konservasi perairan terdiri atas: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan, bahwa: (1) Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan pengawasan; (2) pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (a) penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan; dan (b) pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi; (3) pengawasan dilaksanakan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; dan (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan.

2. Kebijakan dan Strategi Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.PER.30/Men/2009 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, menyebutkan sebutkan antara lain: Pada Bab III mengenai Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan terdiri atas: rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 20 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan.

Pasal 6 menjabarkan bahwa strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan meliputi: (a) penguatan kelembagaan; (b) penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau (c) penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pasal 7 menjabarkan rencana jangka menengah dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan, Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan dilakukan melalui program antara lain: (a) peningkatan sumber daya manusia; (b) penatakelolaan kelembagaan; (c) peningkatan kapasitas infrastruktur; (d) penyusunan peraturan pengelolaan kawasan; (e) pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat; (f) pengembangan kemitraan; (g) pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan; (h) pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau (i) monitoring dan evaluasi.

Sedangkan Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dilakukan melalui program antara lain: (a) perlindungan habitat dan populasi ikan; (b) rehabilitasi habitat dan populasi ikan; (c) penelitian dan pengembangan; (d) pemanfaatan sumber daya ikan; (e) pariwisata alam dan jasa lingkungan; (f) pengawasan dan pengendalian; dan/atau (g) monitoring dan evaluasi. Pasal 7 ayat (4) menyebutkan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, ekonomi, dan budaya, dilakukan melalui program antara lain: (a) pengembangan sosial ekonomi masyarakat; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) pelestarian adat dan budaya; dan (d) monitoring dan evaluasi.

3. Visi dan Misi Pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Visi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah “Terwujudnya SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya”. Sedangkan misi

yang ditetapkan untuk mencapai visi adalah melakukan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat secara efektif melalui kelembagaan pengelolaan yang kuat dalam kerangka jejaring KKP Raja Ampat.

4. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

a. Tujuan Pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah:

1. Membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga pengelola dan para pihak dalam mengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
2. Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi unit pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan unit pengelola KKPD Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Propinsi Papua Barat didalam pengelolaannya maupun pengelolaan jejaring KKP di Raja Ampat umumnya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan program dan kegiatan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat meliputi perikanan, pariwisata, pelibatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan.

b. Sasaran Pengelolaan

Sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat adalah:

1. Terbentuknya lembaga pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kedua KKPN tersebut.
2. Terwujudnya kerjasama dan koordinasi antara unit pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan unit pengelola KKPD Raja Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Propinsi Papua Barat didalam pengelolaannya maupun jejaring KKP Raja Ampat.
3. Terlaksananya program dan kegiatan pengelolaan perikanan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, monitoring dan pengawasan di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

B. Strategi Pengelolaan Kawasan

Strategi pengelolaan jangka panjang kawasan konservasi perairan Suaka Alam Perairan Waigeo Sebelah Barat yaitu penguatan kelembagaan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

1. Penguatan Kelembagaan

Belajar dari keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi diberbagai tempat, salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi terletak pada keberadaan lembaga pengelola dilapangan serta kemampuan dan kapasitas lembaga pengelola tersebut dalam mengelola kawasan. Lembaga pengelola yang handal diharapkan dapat menjadi motor penggerak maupun pelaksana program dan kegiatan dalam pengelolaan kawasan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan. Faktor lain dalam menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pihak terkait pengelolaan kawasan. Diketahui bahwa banyak pihak berkepentingan terhadap Suaka Alam Perairan dengan persepsi dan kemampuan yang berbeda-beda. Adanya persepsi positif terhadap kawasan dan kemampuan yang memadai untuk terlibat dalam pengelolaan akan menjadi modal berharga untuk keberhasilan pengelolaan kawasan.

Program untuk melaksanakan strategi pembangunan dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan para pihak sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP Raja Ampat.
- b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat.
- c. Penguatan kapasitas para pihak terkait pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.
- d. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.
- e. Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.

- f. Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada berbagai tingkatan pemerintahan.
 - g. Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.
 - h. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan aturan pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.
 - i. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.
 - j. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan.
2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
- Pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya sosial, budaya dan ekonomi di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status dan fungsinya. Kelestarian sumber daya alam serta terpeliharanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya seperti ikan penting selain untuk menjamin kelestariannya, juga menjamin sumber protein dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Pengelolaan terumbu karang penting untuk tetap mempertahankan Raja Ampat sebagai daya tarik dan tujuan wisata.
- Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut:
- a. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
 - b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
 - c. Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Baratserta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia
 - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan
3. Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya sosial, budaya dan ekonomi di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status dan

fungsinya. Kelestarian sumber daya alam serta terpeliharanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya seperti ikan penting selain untuk menjamin kelestariannya, juga menjamin sumber protein dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Pengelolaan terumbu karang penting untuk tetap mempertahankan Raja Ampat sebagai daya tarik dan tujuan wisata.

Tabel 11. Strategi Pengelolaan

No	Strategi	Program	Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
			Pelatihan monitoring dan pengawasan
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu
			Pelatihan penyadaran masyarakat dan komunikasi
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP
			Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP
		Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP	
Pelatihan penegakan hukum lingkungan			
		Penata kelolaan	Pembentukan unit kerja Pengelola Kawasan SAP Kepulauan Waigeo

No	Strategi	Program	Kegiatan
		kelembagaan	Sebelah Barat
			Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas
			Menyusun model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang efektif
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan
			Penyusunan dan sosialisasi pemanfaatan kawasan baik untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian
			Penyusunan dan sosialisasi pemantauan kawasan
			Penyusunan protokol monitoring sumber daya di dalam kawasan
			Penyusunan protokol kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun studi banding
			Penyusunan protokol penyelesaian konflik
		Pengembangan infrastruktur	Verifikasi batas-batas terluar SAP
			Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP
			Diskusi status SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah

No	Strategi	Program	Kegiatan
			Kabupaten Raja Ampat
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti
			Pembangunan kantor unit organisasi pengelola SAP di Ibukota Kabupaten Raja Ampat
			Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan
			Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola di dekat lokasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
			Pengadaan kendaraan untuk mobilisasi personil baik mobil, maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten
			Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten maupun di kantor lapangan
			Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
			Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis SAP
			Pembangunan pusat informasi kawasan konservasi di Ibukota kabupaten dan di dalam lokasi SAP
			Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di lokasi SAP

No	Strategi	Program	Kegiatan
		Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia
			Kajian keterhubungan biofisik antar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan KKP lainnya pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif
			Pelatihan bisnis yang sering

No	Strategi	Program	Kegiatan
			dengan konservasi
			Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya
			Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan
		Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan	Evaluasi struktur kelembagan pengelola
			Evaluasi kompetensi personel

No	Strategi	Program	Kegiatan
			dalam struktur lembaga pengelola
			Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat secara efektif
		Program Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	Studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
			Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan
			Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
			Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor
			Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Studi model kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Identifikasi dan kajian

No	Strategi	Program	Kegiatan
			kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP
			Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional
			Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional
		Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada berbagai tingkatan pemerintahan	Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun jejaring Kawasan Konservasi Nasional bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum
			Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat
			Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, provinsi maupun kementerian terkait
			Pengembangan kemitraan

No	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat</p> <p>Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan instansi penegak hukum</p>
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	<p>Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat</p> <p>Monitoring dan evaluasi pemanfaatan</p>	<p>Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan populasi ikan</p> <p>Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan SAP</p> <p>Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan</p> <p>Rehabilitasi mangrove</p> <p>Rehabilitasi padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyu</p> <p>Pengkajian dan evaluasi kondisi stok perikanan</p> <p>Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan</p> <p>Transplantasi terumbu buatan</p> <p>Restocking ikan-ikan ekonomis penting</p> <p>Pengkajian konektifitas ekologi SAP dengan KKP di sekitarnya</p> <p>Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster</p> <p>Pengkajian status ekologi di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat</p>

No	Strategi	Program	Kegiatan
		sumber daya	Monitoring kesehatan karang secara berkala
			Monitoring kondisi mengrove secara berkala
			Monitoring peneluran penyu secara berkala
			Monitoring SPAGs secara berkala
			Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang
			Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum
			Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat
		Monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan	Kajian dan evaluasi kondisi ekologi
			Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat
			Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekitar kawasan
			Pemanfaatan Sumber daya Perikanan secara berkelanjutan
			Pelestarian Adat dan Budaya

No	Strategi	Program	Kegiatan
			Pemberdayaan Masyarakat
			Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan
			Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP
			Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler
			Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah
			Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP

BAB V RENCANA JANGKA MENENGAH

A. Umum

Rencana pengelolaan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan jangka panjang. Penjabaran untuk setiap strategi pengelolaan yang akan dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

B. Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama)

1. Penguatan kelembagaan

Program dan kegiatan pengelolaan dalam rangka mendukung strategi penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP di Kabupaten Raja Ampat.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2007, Pasal 15 ayat (1), menyebutkan bahwa KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Pasal 15 ayat (2), menyebutkan pengelolaan KKP dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dibawah BKKPN Kupang yang terletak di Kupang. BKKPN Kupang ini mendapat mandat untuk mengelola 8 KKPN yang tersebar dikawasan Indonesia Timur termasuk Raja Ampat. Letak BKKPN Kupang yang jauh SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Kabupaten Raja Ampat membuat pengelolaan SAP ini sulit untuk dilakukan dan dapat menimbulkan persepsi tidak adanya lembaga pengelola SAP dilapangan. Agar pengelolaan keseluruhan KKP dapat berjalan dengan baik dan efisien, maka perlu dilakukan kerjasama antara unit organisasi pengelola KKPN dengan KKPD dan kemitraan antara unit organisasi pengelola KKPN dengan para pihak. Kelembagaana kemitraan tersebut perlu dibentuk, dikembangkan dan diperkuat dalam konteks jejaring KKP Raja Ampat. Kegiatan untuk menjalankan program ini adalah:

- 1) Studi model kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat.
- 2) Identifikasi dan kajian kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP
- 3) Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat
- 4) Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Raja Ampat dan SAP Kepulauan Waigeo
- 5) Studi model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- 6) Pembentukan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- 7) Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola

b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat

Keberhasilan unit organisasi pengelola dalam mengelola sebuah kawasan konservasi salah satunya sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang ada didalam organisasi pengelola tersebut. Kapasitas unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat perlu dibangun dan ditingkatkan guna menghadapi peluang, tantangan dan ancaman didalam pengelolaannya.

Program penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pelatihan pengelolaan organisasi
- 2) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- 3) Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu
- 4) Pelatihan monitoring dan pengawasan
- 5) Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
- 6) Pelatihan penyadartahuan dan komunikasi
- 7) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP
- 8) Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP
- 9) Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP
- 10) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik
- 11) Pelatihan penegakan hukum lingkungan

c. Penguatan kapasitas para pihak terkait pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat

Keterlibatan para pihak dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat. Agar kualitas partisipasi para pihak ini memadai dalam pengelolaan kawasan, maka kapasitasnya perlu dibangun dan ditingkatkan.

Kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kapasitas para pihak terdiri dari:

- 1) Pelatihan KKP dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
- 2) Pelatihan monitoring dan pengawasan sumber daya
- 3) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- 4) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif.
- 5) Pelatihan bisnis konservasi
- 6) Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik
- 7) Diskusi reguler antara pengelola Sap dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP
- 8) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan

d. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Dalam kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat terdiri dari unsur-unsur perwakilan masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Keberadaan unsur-unsur dalam kelembagaan kemitraan ini perlu dibentuk dan diperkuat agar dapat berjalan dan berfungsi dengan tujuan pembentukannya.

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring KKP Kabupaten Raja Ampat
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya
- 3) Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring KKP Raja Ampat
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan

- e. Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.

SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan bagian dari jejaring KKP Raja Ampat yang perlu dikembangkan pengelolaannya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia. Sebagai bagian KKP pada berbagai tingkatan, unit organisasi pengelolanya perlu melakukan pengembangan pengelolaan dengan pengelola KKP lainnya pada skala propinsi, nasional, regional dan dunia.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat sebagai berikut:

- 1) Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.
- 2) Kajian keterhubungan biofisik antar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan KKP lainnya pada tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional.

- f. Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Kemitraan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat tidak hanya dengan unit organisasi pengelola KKP lainnya, namun juga perlu dibangun dan dikembangkan dengan pemerintah pada berbagai tingkatan dari pemerintahan desa sampai propinsi. Kemitraan ini terkait dengan koordinasi pengelolaan kawasan baik untuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun dalam konteks jejaring KKP Raja Ampat.

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun jejaring KKP Raja Ampat bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum
- 2) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat

- 3) Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, propinsi maupun kementerian terkait
- 4) Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- 5) Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan instansi penegak hukum.

g. Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat

Infrastruktur yang memadai akan mempermudah dan memperlancar upaya unit organisasi pengelola kawasan maupun para pihak dalam pengelolaannya. Keberadaan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat yang jauh dari ibukota kabupaten, membutuhkan pembangunan infrastuktur yang disesuaikan dengan karakteristik SAP tersebut.

Kegiatan dalam program pembangunan infrastruktur SAP Kepulauan Waigeo Barat sebagai berikut:

- 1) Verifikasi batas-batas terluar SAP
- 2) Diskusi status SAP di Kabupaten Raja Ampat maupun SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan status KKLD Sayang-Wayag antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- 3) Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti.
- 4) Pembangunan kantor unit organisasi pengelola di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat
- 5) Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola baik di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- 6) Pengadaan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Waisai
- 7) Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Waisai maupun di kedua kantor lapangan
- 8) Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
- 9) Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis pada setiap SAP

- 10) Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan
 - 11) Pembangunan pusat informasi pengunjung di Waisai dan di lokasi kedua SAP
 - 12) Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di kedua lokasi SAP
- h. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan aturan pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Sebagai sebuah kawasan konservasi baru, dibutuhkan sejumlah aturan-aturan untuk pengelolaan kawasan. Aturan-aturan ini tidak hanya akan menjadi pedoman dan pegangan bagi unit organisasi pengelola dalam mengelola kawasan, tapi juga menjadi pedoman dan pegangan bagi para pihak dalam pemanfaatan ataupun terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Kegiatan terkait pengembangan kebijakan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Barat sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya
 - 2) Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan
 - 3) Penyusunan dan sosialisasi pemanfaatan kawasan baik untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian
 - 4) Penyusunan dan sosialisasi pemantauan kawasan
 - 5) Penyusunan panduan monitoring sumber daya didalam kawasan
 - 6) Penyusunan panduan kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian maupun studi banding.
 - 7) Penyusunan panduan penyelesaian konflik
- i. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Keberhasilan pengelolaan sebuah kawasan konservasi tidak terlepas dari pendanaan yang memadai baik untuk insentif pihak pengelola maupun menjalankan berbagai program dan kegiatan dilapangan. Pendanaan pengelolaan kawasan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, juga diharapkan kontribusi dari APBD maupun sumber-sumber lain. Dengan adanya sumber dana yang bervariasi diharapkan akan dapat mencukupi kebutuhan dana dalam pengelolaan kawasan.

Kegiatan dalam pengembangan sistem pendanaan untuk pengelolaan kawasan sebagai berikut:

- 1) Studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat
- 2) Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan
- 3) Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
- 4) Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor
- 5) Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor

j. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan

Evaluasi efektifitas kelembagaan pengelola SAP Kepulauan Waigeo Barat perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola maupun lembaga mitra pengelola. Evaluasi dapat dilakukan terhadap struktur organisasi atau pun terhadap orang-orang yang menduduki jabatan tertentu. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja lembaga mitra di dalam pengelolaan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelola kawasan meliputi:

- 1) Evaluasi struktur kelembagaan pengelola
- 2) Evaluasi kompetensi personel dalam struktur lembaga pengelola
- 3) Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Waigeo Barat secara efektif.

2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan

Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut :

a. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Pengelolaan sumber daya alamnya dilakukan tidak hanya melalui perlindungan dan rehabilitasi, juga melalui pemanfaatan sumber daya secara lestari baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan lainnya. Upaya perlindungan dan rehabilitasi guna menjamin kelestarian sumber daya, sedangkan upaya pemanfaatan secara lestari guna memberikan manfaat dari potensi sumber daya.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP sebagai berikut:

- 1) Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan populasi ikan.
- 2) Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan di kedua SAP
- 3) Pengkajian konektivitas ekologi dua SAP Waigeo Barat dengan KKP di sekitarnya
- 4) Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster
- 5) Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan
- 6) Rehabilitasi mangrove
- 7) Rehabilitasi padang lamun di feeding grounds penyu
- 8) Transplantasi terumbu buatan
- 9) Restocking ikan-ikan ekonomis penting
- 10) Pengkajian dan evaluasi kondisi stok perikanan.
- 11) Pengkajian pengembangan ekowisata bahari
- 12) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan

b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Dalam kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dapat terdiri dari unsur-unsur perwakilan masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Keberadaan unsur-unsur dalam kelembagaan kemitraan ini perlu dibentuk dan diperkuat agar dapat berjalan dan berfungsi dengan tujuan pembentukannya.

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring KKP Raja Ampat
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya
- 3) Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo dan jejaring KKP Raja Ampat
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan.

- c. Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah baratserta jejaring KKP Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia

SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan bagian dari jejaring KKP Raja Ampat yang perlu dikembangkan pengelolaanya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia. Sebagai bagian KKP pada berbagai tingkatan, unit organisasi pengelolanya perlu melakukan pengembangan pengelolaan dengan pengelola KKP lainnya pada skala propinsi, nasional, regional dan dunia.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP Raja Ampat sebagai berikut:

- 1) Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat propinsi, nasional, regional dan dunia.
- 2) Kajian keterhubungan biofisik antar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Baratdengan KKP lainnya pada tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional.

- d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya serta efektivitas pengelolaan kawasan

Pengelolaan sebuah kawasan konservasi perlu dilakukan secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan kawasan tersebut. Efektivitas pengelolaan akan menghasilkan efisiensi didalam upaya pengelolaan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap beberapa aspek.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya serta efektifitas pengelolaan kawasan meliputi:

- 1) Pengkajian status ekologi, baik kondisi terkini terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai peneluran penyu, *feeding grounds* penyu, tempat pemijahan ikan (*Spawning Agregation Sites ~ SPAGs*), dan tempat-tempat penting lainnya
- 2) Monitoring kesehatan karang secara berkala
- 3) Monitoring kondisi mengrove secara berkala
- 4) Monitoring peneluran penyu secara berkala
- 5) Monitoring SPAGs secara berkala
- 6) Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam kawasan SAP Raja Ampat.

- 7) Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang.
- 8) Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum.
- 9) Monitoring arus kunjungan wisata yang datang ke SAP Raja Ampatserta dampak yang ditimbulkan baik yang bersifat positif maupun negatif.
- 10) Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat
- 11) Kajian dan evaluasi kondisi ekologi
- 12) Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat
- 13) Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan

3. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya

Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan dilakukan melalui program yaitu:

a. Penguatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Sistem sosial dan budaya masyarakat perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari asset dan dukungan dalam pengelolaan kawasan. Hal penting lainnya adalah pengelolaan kawasan harus memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk kebutuhan hidup maupun ekonomi.

Kegiatan penguatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di SAP Waigeo Barat sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP
- 2) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah.
- 3) Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler.

Tabel 12. MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-I
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan, pengelolaan organisasi	Tersedianya SDM pengelola kawasan sesuai tugas, fungsi dan kompetensinya	BKKPN
			Pelatihan, perencanaan dan pengelolaan KKP	Tersedianya SDM pengelola kawasan dalam perencanaan dan pengelolaan KKP	BKKPN
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	Tersedianya SDM pengelola dalam monitoring dan pengawasan	BKKPN
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan data base	Tersedianya SDM dalam pengembangan dan pengelolaan database	BKKPN
			Studi banding atau kunjungan ke KKP	Terlaksananya studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			lain yang telah dikelola dengan baik	telah dikelola dengan baik	
		Penata kelolaan kelembagaan	Pembentukan unit kerja Pengelola Kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Terbentuknya unit kerja Pengelola Kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN
			Seleksi dan pengisian personil unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya formasi, seleksi dan penerimaan SDM untuk pengelola kawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKKPN
			Menyusun model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang efektif	Adanya Model unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang efektif	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan stakeholder terkait mengetahui zonasi dan aturan didalamnya	BKKPN DKP Raja Ampat
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya ikan	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui peraturan perundangan terkait pengelolaan KKP	BKKPN DKP Raja Ampat
			Penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan dan sosialisasi kawasan, untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman pemanfaatan kawasan untuk pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian • Masyarakat dan stakeholder terkait mengetahui pedoman pemanfaatan kawasan untuk 	BKKPN DKP Raja Ampat dan Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
				pariwisata, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pendidikan dan penelitian	
			Penyusunan pedoman pemantauan dan sosialisasi pemantauan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman pemantauan kawasan • Masyarakat dan stakeholder terkait mengetahui pedoman pemantauan kawasan 	BKKPN DKP Raja Ampat dan Mitra
			Penyusunan panduan monitoring sumber daya di dalam kawasan	Adanya panduan monitoring sumber daya di dalam kawasan	BKKPN DKP Raja Ampat dan Mitra
			Penyusunan panduan kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan,	Adanya panduan kunjungan ke kawasan baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun studi banding	BKKPN DKP Raja Ampat Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			penelitian, maupun studi banding		
			Penyusunan panduan penyelesaian konflik	Adanya panduan penyelesaian konflik	BKKPN DKP Raja Ampat Mitra
		Pengembangan infrastruktur	Verifikasi batas-batas terluar SAP	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan tata batas • Pengukuran batas kawasan 	BKKPN Pemda Kab Pemda Prop Mitra
			Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP	Adanya tanda batas yang sudah dipasang	BKKPN
			Diskusi status SAP Raja Ampat dan status kawasan konservasi lainnya	Kejelasan status dan wewenang pengelolaan SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara	BKKPN Pemda Kab Pemda Prop Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat		
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama pada zona inti	Tanda pelampung di setiap titik sudut zona sudah terpasang	BKKPN
			Pembangunan kantor unit organisasi pengelola SAP di Ibukota Kabupaten Raja Ampat	Kantor unit pengelola kawasan sudah dibangun	BKKPN
			Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait	Papan pengumuman dan perikanan sudah terpasang didalam dan sekitar kawasan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			dengan kawasan		
		Pengembangan kerjasama jejaring kawasan konservasi SAP di Kabupaten Raja Ampat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia.	Melakukan koordinasi berkala antar unit organisasi pengelola SAP di Kabupaten Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Adanya Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP di Kabupaten Raja Ampat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	BKKPN Pemda Kab Pemda Prop
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP di	Pemetaan detail potensi kawasan tiap zona dalam rangka	Data dan informasi potensi kawasan tiap zona dalam rangka perlindungan habitat dan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
	Kawasan	Kabupaten Raja Ampat	perlindungan habitat dan populasi ikan	populasi ikan	
			Pengkajian nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan SAP	Data dan informasi nilai ekonomi dan nilai ekologi kawasan	BKKPN
			Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi terumbu karang di dalam kawasan sesuai dengan kajian	BKKPN
			Rehabilitasi ekosistem mangrove	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove didalam kawasan sesuai dengan kajian	BKKPN
			Rehabilitasi ekosistem padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyu	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi padang lamun di <i>feeding ground</i>	BKKPN
			Pengkajian dan	Data dan informasi kondisi stok	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			evaluasi kondisi stok sumber daya perikanan	sumber daya perikanan	
			Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan	BKKPN
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Pengkajian status ekologi di SAP di Kabupaten Raja Ampat	Data dan informasi status ekologi kawasan	BKKPN
			Monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang secara berkala	Data dan informasi kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang	BKKPN
			Monitoring kondisi ekosistem mangrove secara berkala	Data dan informasi kondisi ekosistem mangrove	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	Data dan informasi kondisi habitat peneluran penyu	BKKPN
			Monitoring SPAGs secara berkala	Data dan informasi SPAGs	BKKPN
			Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP di Kabupaten Raja Ampat	Tingkat persepsi masyarakat terhadap SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi.	BKKPN
			Monitoring strategi	Tingkat kepatuhan dan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			pengawasan dan penegakan hukum	pelanggaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan kawasan konservasi.	
			Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat	Pola pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat	BKKPN
		Monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan	Kajian dan evaluasi kondisi ekologis	Terlaksananya monitoring kondisi ekologis kawasan	BKKPN
			Kajian dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat	Terlaksananya monitoring kondisi sosial ekonomi masyarakat	BKKPN
			Kajian dan evaluasi tata kelola kawasan konservasi	Terlaksananya monitoring tata kelola kawasan konservasi.	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekitar kawasan	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM bagi masyarakat sekitar kawasan	BKKPN/DKP Prov./Kab
			Pemanfaatan Sumber daya Perikanan secara berkelanjutan	Adanya pemanfaatan sumber daya perikanan oleh masyarakat secara berkelanjutan	BKKPN/DKP Prov./Kab
			Pelestarian Adat dan Budaya	Adanya revitalisasi adat dan budaya masyarakat sekitar kawasan	BKKPN/DKP Prov./Kab

C. Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Kedua)

1. Penguatan Kelembagaan

a. Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelola kawasan meliputi:

- 1) Evaluasi struktur kelembagaan pengelola
- 2) Evaluasi kompetensi personel dalam struktur lembaga pengelola
- 3) Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat secara efektif.

b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Program penguatan kapasitas sumber daya manusia unit organisasi pengelola dilakukan melalui kegiatan:

- (1) Pelatihan pengelolaan organisasi
- (2) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- (3) Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu
- (4) Pelatihan monitoring dan pengawasan
- (5) Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database
- (6) Pelatihan penyadartahuan dan komunikasi
- (7) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP
- (8) Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP
- (9) Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP
- (10) Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik
- (11) Pelatihan penegakan hukum lingkungan

c. Pembangunan infrastruktur pengelolaan kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Kegiatan dalam program pembangunan infrastruktur SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat sebagai berikut:

- 1) Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
- 2) Pengadaan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Waisai

- 3) Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Waisai maupun di kedua kantor lapangan
- 4) Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
- 5) Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis pada setiap SAP
- 6) Pembangunan pusat informasi pengunjung di Waisai dan di lokasi SAP
- 7) Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di lokasi SAP

d. Penguatan kapasitas para pihak terkait pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Keterlibatan para pihak dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Agar kualitas partisipasi para pihak ini memadai dalam pengelolaan kawasan, maka kapasitasnya perlu dibangun dan ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kapasitas para pihak terdiri dari:

- 1) Pelatihan KKP dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
- 2) Pelatihan monitoring dan pengawasan sumber daya
- 3) Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP
- 4) Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif.
- 5) Pelatihan bisnis konservasi
- 6) Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik
- 7) Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP
- 8) Pelatihan kegiatan pariwisata berkelanjutan

e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring KKP Raja Ampat
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya

2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan

Program pengelolaan untuk melaksanakan strategi pengembangan pengelolaan sumber daya sebagai berikut :

a. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP sebagai berikut:

- (1) Pengkajian konektivitas ekologi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan KKP di sekitarnya
- (2) Transplantasi terumbu buatan
- (3) Restocking ikan-ikan ekonomis penting

3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya kawasan akan dilakukan melalui program antara lain:

a. Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat meliputi pengusaha penyedia jasa. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang mendapat manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menerima, melayani, para wisatawan dan menjaga kelestarian sumber daya yang ada di wilayah SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Pemberdayaan dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing dengan tepat, cepat, dan menyenangkan pengguna jasa yang memerlukan layanan.

Masyarakat yang bermukim di setiap pulau dalam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat yang menggantungkan hidupnya, sebagian atau seluruhnya, pada sumber daya alam di sekitar kawasan. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam menjalin kerjasama semua pihak terutama masyarakat lokal. Selama masyarakat setempat masih dianggap obyek pengelolaan, akan

sulit terjalin kerja sama, koordinasi dan komunikasi seperti yang diharapkan.

Untuk mewujudkan pola pengelolaan secara efisien dan efektif, pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dituntut berperan dalam pengembangan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, sebagai fasilitator bagi kegiatan pemanfaatan ekstraktif terbatas. Untuk mendukung hal tersebut, Pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif dengan semua stakeholder pembangunan, terutama komunitas masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Adapun kegiatan yang perlu dijalankan dalam rangka mengajak masyarakat dalam penyatuan pengelolaan adalah dengan *pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan kegiatan*.

b. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan

Pengembangan potensi ekonomi non perikanan dalam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat perlu dikembangkan terutama untuk mendukung pengelolaan kawasan seperti kegiatan keterampilan dalam pembuatan cinderamata (souvenir) dari bahan baku berbasis sumber daya laut, rental peralatan penyelaman, dan kader konservasi. Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa-jasa wisata, dan berbagai kegiatan insidental yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan seperti kegiatan seni dan budaya.

Tabel 13. MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE- II
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	Tersedianya SDM pengelola organisasi yang terlatih sesuai tugas dan fungsi	BKKPN/DKP Provinsi/ Kabupaten
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang perencanaan dan pengelolaan KKP	BKKPN
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang monitoring dan pengawasan	BKKPN
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP	Pimpinan dan Staf yang terlatih pengelolaan kawasan lanjutan	BKKPN
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber daya	BKKPN
			Pelatihan penyadaran	Adanya masyarakat yang	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			masyarakat dan komunikasi	terlatih dibidang komunikasi	
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang pengembangan pemanfaatan kawasan	BKKPN
			Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP	Adanya masyarakat yang terlatih dan terlibat dalam pengelolaan KKP	BKKPN
			Pelatihan resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam dan KKP	Tersedianya SDM yang terlatih dibidang resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP	BKKPN
			Pelatihan penegakan hukum lingkungan	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dalam penegakan hukum lingkungan	BKKPN
		Penata kelolaan kelembagaan	Seleksi dan pengisian personil unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya formasi, seleksi dan penerimaan SDM untuk pengelola kawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui zonasi dan aturan didalamnya	BKKPN
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui peraturan perundangan terkait kawasan konservasi sumber daya ikan	BKKPN/DKP Provinsi/Kabupaten
			Diskusi status SAP Raja Ampat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Kejelasan status dan wewenang pengelolaan SAP Raja Ampat	BKKPN/DKP Provinsi/Kabupaten
			Pembangunan kantor lapangan unit organisasi pengelola di dekat lokasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.	Kantor lapangan sudah terbangun	BKKPN
			Pengadaan kendaraan bermotor untuk mobilisasi personil baik	Tersedianya kendaraan operasional pengelola kawasan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			mobil, maupun sepeda motor untuk kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten		
			Pengadaan alat komunikasi telepon dan internet baik di kantor unit organisasi pengelola di Ibukota kabupaten maupun di kantor lapangan	Tersedianya alat komunikasi untuk pengelola kawasan	BKKPN
			Pengadaan speed boat untuk masing-masing kantor dengan spesifikasi disesuaikan dengan kebutuhan	Tersedianya speed boat untuk pengelola kawasan	BKKPN
			Pembangunan menara pengawas di titik-titik strategis SAP	Tersedianya menara pengawas di titik yang sudah ditentukan	BKKPN
			Pembangunan pusat informasi kawasan konservasi di ibukota kabupaten dan di dalam lokasi	Tersedianya pusat informasi kawasan konservasi	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			SAP		
			Pembangunan sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di lokasi SAP	Tersedianya sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah di kawasan	BKKPN
		Pengembangan kerjasama jejaring kawasan konservasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional,	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Terlaksananya koordinasi secara rutin berkala Pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya	BKKPN/DKP Provinsi/Kabupaten

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		regional, dan dunia			
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP	Adanya Pendidikan lanjutan bagi para pemimpin dan staf SAP	BKKPN
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Adanya Para pihak yang terlatih dalam pengelolaan KKP dan sumber daya pesisir dan laut	BKKPN
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya	Adanya Para pihak yang terlatih dalam monitoring dan pengawasan sumber daya	BKKPN
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif	Adanya Para pihak yang terlatih dalam pengembangan pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif	BKKPN
			Pelatihan bisnis yang sering dengan konservasi	Adanya Para pihak yang terlatih bidang bisnis yang sering dengan konservasi	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Studi banding atau kunjungan KKP lain yang telah dikelola dengan baik	Adanya Para pihak yang dilibatkan dalam studi banding	BKKPN
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP	Terlaksananya diskusi reguler antara pengelola dan masyarakat	BKKPN
			Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	BKKPN
			Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum para pihak lainnya seperti forum swasta pengelola resort dan lainnya	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
2.		Monitoring dan evaluasi kelembagaan pengelolaan kawasan	Evaluasi struktur kelembagan pengelola	Laporan hasil evaluasi struktur kelembagan pengelola	BKKPN
			Evaluasi kompetensi personil dalam struktur lembaga pengelola	Laporan hasil evaluasi kompetensi personil dalam struktur lembaga pengelola	BKKPN
			Evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Raja Ampat secara efektif	Hasil evaluasi kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SAP Raja Ampat secara efektif	BKKPN
	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Terlaksananya rehabilitasi ekosistem mangrove didalam kawasan sesuai kajian	BKKPN
			Rehabilitasi ekosistem padang lamun di <i>feeding grounds</i> penyusu	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi padang lamun di <i>feeding ground</i>	BKKPN
			Transplantasi terumbu buatan	Terlaksananya kegiatan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
				rehabilitasi ekosistem terumbu karang didalam kawasan sesuai dengan kajian sebelumnya	
			Restocking ikan yang bernilai ekonomi penting	Terlaksananya restocking ikan yang bernilai ekonomi penting	BKKPN
			Pengkajian konektifitas ekologi SAP dengan KKP di sekitarnya	Data dan informasi hasil kajian konektifitas ekologi SAP dengan KKP sekitarnya	BKKPN
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang secara berkala	Data dan informasi kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang	BKKPN
			Monitoring kondisi ekosistem mangrove secara berkala	Data dan informasi kondisi ekosistem mangrove	BKKPN
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	Data dan informasi kondisi habitat peneluran penyu	BKKPN
			Monitoring SPAGs secara berkala	Data dan informasi SPAGs	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	BKKPN
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	BKKPN
			Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Non-Perikanan	BKKPN

D. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ketiga)

1. Penguatan Kelembagaan

a. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP di Kabupaten Raja Ampat

Kegiatan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan jejaring KKP di Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut:

- (1) Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP di Kabupaten Raja Ampat;
- (2) Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring KKP di Kabupaten Raja Ampat

b. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Kegiatan dalam pengembangan sistem pendanaan untuk pengelolaan kawasan sebagai berikut:

- (1) Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan
- (2) Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan
- (3) Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor
- (4) Sosialisasi pengelolaan SAP dengan lembaga-lembaga donor.

2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan

1. Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Raja Ampat
Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat sebagai berikut :

- (1) Rehabilitasi terumbu karang di zona pemanfaatan
- (2) Rehabilitasi mangrove
- (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.

2. Penguatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Kegiatan penguatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP
- 2) Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan even-even budaya secara reguler

Tabel. 14. MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE- III SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	SDM pengelola organisasi yang terlatih sesuai tugas dan fungsi	BKKPN/DKP Provinsi/ Kabupaten
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	SDM pengelola yang terlatih dibidang perencanaan dan pengelolaan KKP	BKKPN
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	SDM pengelola yang terlatih dibidang monitoring dan pengawasan	BKKPN
			Pelatihan pengembangan dan pengelolaan database	SDM pengelola dalam pengembangan dan pengelolaan database	BKKPN
			Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola	Terlaksananya Studi banding atau kunjungan ke KKP lain yang telah dikelola dengan baik	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			dengan baik		
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP	Pimpinan dan Staf yang terlatih pengelolaan kawasan lanjutan	BKKPN
			Pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terpadu	BKKPN
			Pelatihan penyadaran masyarakat dan komunikasi	Adanya masyarakat yang terlatih dibidang komunikasi	BKKPN
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP	SDM pengelola yang terlatih dibidang pengembangan pemanfaatan kawasan	BKKPN
			Pelatihan resolusi konflik pengelolaan sumber daya alam dan KKP	SDM yang terlatih dibidang resolusi konflik pengelolaan sumber daya	BKKPN
			Pelatihan penegakan	SDM pengelola yang terlatih dalam	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			hukum lingkungan	penegakan hukum lingkungan	
		Penata kelolaan kelembagaan	Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya formasi, seleksi dan rekrutment SDM untuk pengelola kawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKKPN
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan-aturan didalamnya	Masyarakat dan Stakeholders terkait mengetahui zonasi dan aturan didalamnya	BKKPN
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui peraturan perundangan terkait kawasan konservasi sumber daya ikan	BKKPN/DKP Provinsi/Kabupaten
		Pengembangan infrastruktur	Pembuatan tanda batas di dalam dan diluar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Adanya tanda batas di dalam dan di luar kawasan konservasi	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Diskusi status SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan status kawasan konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Kejelasan status dan wewenang pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN/DKP Provinsi/Kabupaten
			Pemasangan pelampung tanda di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti	Terpasangnya tanda pelampung di setiap titik sudut zona SAP, terutama di zona-zona inti	BKKPN
		Pengembangan kerjasama pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya	Adanya koordinasi secara rutin berkala Pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya	BKKPN/DKP Prov./Kab

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		jejaring Kawasan Konservasi Nasional antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia		
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP	Adanya Pendidikan lanjutan bagi para pemimpin dan staf SAP	BKKPN
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Adanya Para pihak yang terlatih dalam pengelolaan KKP dan sumber daya pesisir dan laut	BKKPN
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan	Adanya Para pihak yang terlatih dalam monitoring dan pengawasan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			sumber daya	sumber daya	
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif	Adanya Para pihak yang terlatih dalam pengembangan pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif.	BKKPN
			Pelatihan bisnis yang sering dengan konservasi	Adanya Para pihak yang terlatih bidang bisnis yang sering dengan konservasi	BKKPN
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Terlaksananya diskusi reguler antara pengelola dan masyarakat	BKKPN
		Program Pengembangan sistem pendanaan	Studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Waigeo	Tersedianya laporan studi model sistem pendanaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		berkelanjutan	Sebelah Barat		
			Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan	Tersedianya laporan Identifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif dalam mendukung sistem pendanaan berkelanjutan	BKKPN
			Penyusunan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	Tersedianya laporan strategi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan	BKKPN
			Pelaksanaan model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah	Terlaksananya model sistem pendanaan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga donor	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Daerah maupun lembaga-lembaga donor		
			Sosialisasi pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan lembaga-lembaga donor	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan lembaga-lembaga donor	BKKPN
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Studi model kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Tersedianya laporan studi model kelembagaan kemitraan dan jejaring KKP	BKKPN
			Identifikasi dan kajian kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP	Tersedianya laporan Identifikasi dan kajian kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang di zona pemanfaatan	Terlaksananya rehabilitasi ekosistem terumbu karang di zona pemanfaatan	BKKPN
			Restocking ikan yang memiliki nilai ekonomi penting	Terlaksananya Restocking ikan yang memiliki nilai ekonomi penting	BKKPN
			Monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang secara berkala	Data dan informasi kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang	BKKPN
			Monitoring kondisi ekosistem mangrove secara berkala	Data dan informasi kondisi ekosistem mangrove	BKKPN
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	Data dan informasi kondisi habitat peneluran penyu	BKKPN
			Monitoring SPAGs secara berkala	Data dan informasi SPAGs	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	BKKPN
3.	Penguatan sosial, ekonomi dan budaya	Pengembangan sosial ekonomi masyarakat	Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP	Adanya kunjungan antar desa-desa di dalam dan sekitar kawasan	BKKPN/Pemerintah Daerah
			Pelestarian adat dan budaya melalui pelaksanaan perayaan festival budaya secara reguler	Adanya perayaan festival budaya secara reguler dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan	BKKPN/Pemerintah Daerah

E. Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Keempat)

1. Penguatan Kelembagaan

a. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan jejaring KKP Raja Ampat

Kegiatan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan jejaring KKP Raja Ampat sebagai berikut:

(1) Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Raja Ampat serta jejaring KKP Raja Ampat;

(2) Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Raja Ampat serta jejaring KKP Raja Ampat

b. Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Raja Ampat pada berbagai tingkatan pemerintahan

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP sebagai berikut:

(1) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Raja Ampat maupun jejaring KKP Raja Ampat bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum

(2) Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok pengawas masyarakat

(3) Pengembangan kemitraan promosi SAP Raja Ampat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, propinsi maupun kementerian terkait

(4) Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Raja Ampat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

(5) Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Raja Ampat dengan instansi penegak hukum

c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP Raja Ampat

Kegiatan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak sebagai berikut:

(1) Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Raja Ampat dan jejaring KKP Raja Ampat

(2) Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan

2. Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan

Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya di SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dalam rangka pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster.

3. Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kegiatan penguatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat SAP Raja Ampat adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan menengah
- (2) Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-
desa di dalam dan di sekitar SAP

Tabel 15. MATRIK PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUN KE-IV
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
1.	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan sumber daya manusia	Pelatihan pengelolaan organisasi	Tersedianya SDM pengelola organisasi yang terlatih sesuai tugas dan fungsi	BKKPN/DKP Prov./Kab
			Pelatihan perencanaan dan pengelolaan KKP	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang perencanaan dan pengelolaan KKP	BKKPN
			Pelatihan monitoring dan pengawasan	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang monitoring dan pengawasan	BKKPN
			Pendidikan lanjut pimpinan dan staf pengelola SAP	Pimpinan dan Staf yang terlatih pengelolaan kawasan lanjutan	BKKPN
			Pelatihan pengembangan pemanfaatan KKP	Tersedianya SDM pengelola yang terlatih dibidang pengembangan pemanfaatan kawasan	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Pelatihan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP	Tersedianya SDM pengelola terlatih dalam pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan KKP	BKKPN
		Penata kelolaan kelembagaan	Seleksi dan pengisian personel unit organisasi pengelola yang berkualitas	Adanya formasi, seleksi dan rekrutment SDM untuk pengelola kawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKKPN
		Pengembangan kebijakan	Sosialisasi zonasi dan aturan didalamnya	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui zonasi dan aturan didalamnya	BKKPN
			Sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya ikan	Masyarakat dan Stakeholder terkait mengetahui peraturan perundangan terkait kawasan konservasi sumber daya ikan	BKKPN/DKP Prov./Kab
		Pengembangan infrastruktur	Diskusi status SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan status kawasan	Kejelasan status dan wewenang pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN/DKP Prov./Kab

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			konservasi lainnya antara pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat		
			Pengadaan papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan	Tersedianya papan-papan pengumuman dan peringatan terkait dengan kawasan	BKKPN
		Pengembangan kerjasama jejaring kawasan konservasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat antar unit organisasi pengelola dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi,	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	Koordinasi berkala unit organisasi pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan pengelola KKP lainnya pada tingkat provinsi, nasional, regional, dan dunia	BKKPN Pemda dan Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		nasional, regional, dan dunia			
		Peningkatan kapasitas para pihak	Pendidikan lanjutan para pemimpin dan staf SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Adanya Pendidikan lanjutan bagi para pemimpin dan staf SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN
			Pelatihan KKP dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Adanya Para pihak yang terlatih dalam pengelolaan KKP dan sumber daya pesisir dan laut	BKKPN
			Pelatihan Monitoring dan pengawasan sumber daya	Adanya Para pihak yang terlatih dalam monitoring dan pengawasan sumber daya	BKKPN
			Pelatihan Pengembangan Pemanfaatan KKP dan mata pencaharian alternatif	Adanya para pihak yang terlatih dalam pengembangan pemanfaatan KKP dan MPA	BKKPN
			Pelatihan bisnis yang seiring dengan konservasi	Adanya Para pihak yang terlatih bidang bisnis yang seiring dengan konservasi	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Diskusi reguler antara pengelola SAP dengan masyarakat di dalam dan di sekitar SAP	Terlaksananya diskusi reguler antara pengelola dan masyarakat	BKKPN Pemda Mitra
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan SAP SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Terlaksananya Penguatan forum masyarakat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional	BKKPN
			Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pertemuan berkala kelembagaan kemitraan	BKKPN
		Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan	Pembentukan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Terbentuknya lembaga kemitraan pengelolaan kawasan	BKKPN/ Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
		jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat serta jejaring Kawasan Konservasi Nasional	Terlaksananya koordinasi berkala dan penguatan kelembagaan kemitraan pengelolaan kawasan	BKKPN/ Mitra
		Pengembangan dan penguatan kemitraan dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat pada berbagai tingkatan pemerintahan	Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun jejaring Kawasan Konservasi Nasional bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum	Adanya pengembangan kemitraan dan jejaring Kawasan Konservasi Nasional bersama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi penegak hukum	BKKPN/ Mitra
			Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok	Adanya Pengembangan kemitraan pengawasan SAP Raja Ampat dengan pemerintah desa dan distrik melalui kelompok	BKKPN/ Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			pengawas masyarakat	pengawas masyarakat	
			Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, provinsi maupun kementerian terkait	Adanya Pengembangan kemitraan promosi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat maupun KKPD Raja Ampat dengan swasta, provinsi maupun kementerian terkait	BKKPN/ Mitra
			Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	Adanya Pengembangan kemitraan pengelolaan sistem tarif masuk SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan swasta dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat	BKKPN/ Mitra
			Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah	Adanya Pengembangan kemitraan penegakan hukum pelanggaran dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dengan instansi	BKKPN/ Mitra

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Barat dengan instansi penegak hukum	penegak hukum	
2.	Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan	Pengelolaan sumber daya alam kawasan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Pengkajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster	Tersedianya laporan kajian kesesuaian lahan budidaya rumput laut, budidaya ikan dengan keramba jaring apung, teripang, dan lobster	BKKPN
		Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya	Monitoring kesehatan karang secara berkala	Data dan informasi kondisi kesehatan terumbu karang	BKKPN
			Monitoring kondisi mangrove secara berkala	Data dan informasi kondisi mangrove	BKKPN
			Monitoring peneluran penyu secara berkala	Data dan informasi kondisi habitat peneluran penyu	BKKPN
			Monitoring SPAGs secara berkala	Data dan informasi SPAGs	BKKPN
			Monitoring persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan	Laporan Tingkat persepsi masyarakat yang hidup di dalam SAP Kepulauan Waigeo Sebelah	BKKPN

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			Waigeo Sebelah Barat	Barat	
			Monitoring kondisi sarana dan prasarana yang mencakup tanda batas, fasilitas pengelolaan, rekreasi, pelayanan, dan penunjang	Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan	BKKPN
			Monitoring strategi pengawasan dan penegakan hukum	Tingkat kepatuhan dan pelanggaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan kawasan	BKKPN
			Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat	Pola pemanfaatan kawasan oleh masyarakat	BKKPN
3.	Penguatan Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha	Adanya pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit berbunga ringan untuk usaha perikanan skala kecil dan	BKKPN/ Pemda

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pelaksana
			perikanan skala kecil dan menengah	menengah	
			Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Adanya kegiatan Pengembangan sosial masyarakat melalui kunjungan antar desa-desa di dalam dan di sekitar SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	BKKPN/ Pemda

BAB VI PENUTUP

Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat, yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat. Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan oleh Satuan Organisasi Unit Pengelola SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat diharapkan mendukung Rencana Pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat secara partisipatif.

Mengingat pengelolaan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana Pengelolaan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sekali.

Namun demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah Kabupaten Raja Ampat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono